

**PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
DAN PERAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN DALAM PENYETORAN BEBAN
PPh TAHUNAN WAJIB PAJAK (WP) ORANG PRIBADI**

(Studi kasus terhadap tingkat kepatuhan pelaporan beban PPh dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta)

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION SELF-ASSESSMENT SYSTEM AND THE ROLE ACCOUNT REPRESENTATIVE ON THE LEVEL OF COMPLIANCE IN THE ANNUAL INCOME TAX BURDEN DEPOSITING INDIVIDUAL TAXPAYERS

**RIZA RESLIA
8335088355**



**Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

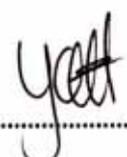
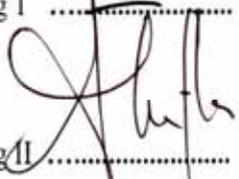
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dra. Nurahma Hajat, M. Si
NIP. 19531002 198503 2 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Ketua		08/01/2013
2. <u>Nuramalia Hasanah, SE, M. Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 002	Sekretaris		08/01/2013
3. <u>Choirul Anwar, SE, Akt, MBA, MAFIS</u> NIP. 19691004 200801 1 010	Penguji Ahli 1		07/01/2013
4. <u>Indra Pahala, SE, M. Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Pembimbing 1		08/01/2013
5. <u>Marsellisa Nindito, SE, Akt, M. Sc</u> NIP. 19750630 200501 2 001	Pembimbing II		09/01/2013

Tanggal Lulus: 20 Desember 2012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2013

Yang membuat pernyataan



RIZA RESLIA

No. Reg. 8335088355

ABSTRAKSI

Riza Reslia, 2012; Pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Karena memang bagaimanapun pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka.

Dari masalah-masalah yang membuat pajak itu menjadi hal yang menakutkan bagi Wajib Pajak (WP) timbul beberapa kasus ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) dalam perpajakannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden yaitu para dosen dan karyawan pada Universitas Negeri Jakarta. Sebelum dilakukan untuk pengujian untuk menjawab hipotesis, dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik setelah itu, untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan alat analisis regresi berganda.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 62.2% variable X^1 dan X^2 dalam mempengaruhi Y . X^1 memiliki nilai t hitung sebesar 2.704 pada tingkat signifikan 0.008 dan t tabel 1.980. Jadi t hitung $>$ t tabel, bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan WP Pribadi. Pada X^2 memiliki nilai t hitung sebesar 3.165 pada tingkat signifikan 0.002 dan t tabel 1.980. jadi t hitung $>$ t tabel, bahwa pelaksanaan *account representative* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) Pribadi. Uji pengaruh simultan (F-test) sebesar 63.448 dan signifikansi sebesar 0.000 dengan demikian adanya pengaruh secara simultan antara pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi.

Kata kunci: *self assessment system*, *account representative* dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi

ABSTRACT

Riza Reslia, 2012; influence the implementation of self-assessment system and the role of account representatives on the level of compliance in reporting annual income tax burden of taxpayers (WP) individual

This study aims to demonstrate empirically the effect of the implementation of the self-assessment system and the role of the representative account of the level of taxpayer compliance (WP) individuals. Because it is after all taxes are expenses that would reduce their income.

Of the issues that make the tax be a scary thing for taxpayers (WP) raises some cases the taxpayer noncompliance (WP) in taxation. The sample used in this study were as many as 80 respondents that the faculty and staff at Univeritas Jakarta. Prior to testing conducted to answer the hypothesis, performed first classical assumption test after that, to answer the research hypothesis using a multiple regression analysis.

Testing the hypothesis in this research by using multiple linear regression analysis. The results of descriptive analysis showed deteminasi coefficient (R2) of 62.2% variable X1 and X2 in influencing Y. X1 has a t value for 2,704 at a significant level of 0,008 and 1,980 t table. So t count > t table, the implementation of self-assessment system, positive influence on the level of compliance with the annual income tax expense in depositing Personal WP. In X2 has a t value for 3,165 at a significant level 0,002 and table t table 1,980. so t count > t table, that the implementation of account representatives positive influence on the level of compliance in depositing the annual Income Tax expense (WP) Private. Test the effect of simultaneous (F-test) of 63,448 and significance of 0,000 is thus the simultaneous effect between self-assessment system implementation and account representatives on the level of compliance in the annual income tax burden depositing taxpayer (WP) personally.

Keywords: *self-assessment system, account representatives and taxpayer compliance (WP) individual*

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berupa materi, pikiran, motivasi serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Nurahma Hajat, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak M. Yasser Arafat, SE. Akt, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Marsellisa Nindito, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

4. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Marsellisa Nindito, SE, M.Sc selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff FE-UNJ yang telah membantu dalam mempersiapkan penelitian untuk skripsi dan mengisi kuesioner dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan.
7. Ayahanda Sapuan Alwi, Ibunda Mudrika dan Adinda Erwin Bahalwan, beserta seluruh keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberikan motivasi baik secara materil maupun spiritual.
8. Teman-teman S1 Akuntansi Non-Reguler 2008 yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam Skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan, untuk itu praktikan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi pembaca.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 2012

RIZA. RESLIA

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1. Kajian Pustaka	12
2.1.1. Pajak	12
2.1.1.1. Pengertian Pajak	12
2.1.1.2. Ciri-ciri Pajak	13
2.1.1.3. Fungsi Pajak	15
2.1.1.4. Penggolongan Jenis Pajak	17
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	20

2.1.2. <i>Self Assessment System</i>	21
2.1.2.1. Pengertian <i>Self Assessment System</i>	23
2.1.2.2. Ciri-ciri <i>Self Assessment System</i>	24
2.1.2.3. Keuntungan dan Kelemahan <i>Self Assessment System</i> ...	25
2.1.2.4. Syarat Keberhasilan <i>Self Assessment System</i>	26
2.1.2.5. Indikator dari <i>Self Assessment System</i>	27
2.1.3. <i>Account Representative</i>	28
2.1.3.1. Pengertian <i>Account Representative</i>	28
2.1.3.2. Tugas <i>Account Representative</i>	30
2.1.3.4. Syarat Profesionalisme <i>Account Representative</i>	31
2.1.3.5. Ciri-ciri <i>Account Representative</i>	33
2.1.3.6. Indikator <i>Account Representative</i>	33
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.1.4.1. Kepatuhan sebagai fondasi <i>self assessment</i>	36
2.1.4.2. Jenis-jenis Kepatuhan	36
2.1.4.2. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan WP	37
2.1.4.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh	38
2.1.4.4. Indikator Dalam Kepatuhan Pajak	39
2.2. Riview Penelitian Relevan	41
2.3. Kerangka Pemikiran	44
2.4. Hipotesis	45
 BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	46
3.2. Metode Penelitian	46
3.3. Operasional Variabel Penelitian	47
3.3.1. Variabel Dependen	47
3.3.2. Variabel Independen	48

3.4. Metode Pengumpulan Data	50
3.5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	50
3.6. Metode Analisis	51
3.6.1. Uji Validitas	51
3.6.2. Uji Reliabilitas	51
3.6.3. Statistik Deskriptif.....	52
3.6.4. Pengujian Asumsi Klasik	52
3.6.4.1. Uji Normalitas	52
3.6.4.2. Uji Multikolonieritas	53
3.6.4.3. Uji Heterokedastisitas	53
3.6.5. Analisis Regresi Bergada	54
3.6.6. Koefisien Determinasi	55
3.6.7. Pengujian Hipotesis	55
3.6.7.1. Uji Parsial (t-test)	55
3.6.7.2. Uji Simultan (F-test)	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Unit Analisis/ Observasi	58
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
4.2.1. Pengujian Hipotesis	61
4.2.1.1. Uji Validitas	61
4.2.1.2. Uji Reliabilitas	63
4.2.1.3. Statistik Deskriptif	64
4.2.2. Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.2.2.1. Uji Normalitas	73
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas	76
4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas	77
4.2.3. Pengujian Hipotesis	79

4.2.3.1. Uji Regresi Berganda	79
4.2.3.2. Uji Koefisien Determinasi	81
4.2.3.3. Uji Parsial (t-test)	82
4.2.3.4. Uji Simultan (F- test)	84
4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	93
5.2. Keterbatasan dan Saran	96
5.2.1. Keterbatasan Penelitian	96
5.2.2. Saran	97
5.2.2.1. Akademik	97
5.2.2.2. Praktisi	98

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Riview Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1	Indikator Variabel Penelitian dan Pengukurannya	50
Tabel 4.1	Distribusi Responden Kuesioner	60
Tabel 4.2	Distribusi Pengembalian Kuesioner	61
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif <i>Self Assessment System</i>	62
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif <i>Account Representative</i>	63
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan	64
Tabel 4.6	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	65
Tabel 4.7	Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan..	66
Tabel 4.8	Lama Responden bekerja di UNJ	67
Tabel 4.9	Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.10	Jenis Pekerjaan Responden	69
Tabel 4.11	Lama Responden memiliki NPWP	70
Tabel 4.12	Instrumen Penelitian Berdasarkan Validitas	72
Tabel 4.13	Uji Reliabilitas	74

Tabel 4.14	Tabel Uji One Sample K-S.....	77
Tabel 4.15	Uji Moultikolonieritas	78
Tabel 4.16	Uji Glejser	80
Tabel 4.17	Uji Regresi Berganda	81
Tabel 4.18	Koefisien Determinasi	83
Tabel 4.19	Uji Parsial (t-test)	85
Tabel 4.20	Uji Pengaruh Simultan (F-test)	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	44
Gambar 4.1	Histogram Hasil Uji Normalitas	75
Gambar 4.2	Grafik Normalitas Dengan P-P Plot	76
Gambar 4.3	<i>Scatterplot</i> Hasil Uji Heterokedasitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Judul
1.	Kuesioner Penelitian
2.	Data Kuesioner
3.	Uji Validitas
4.	Ringkasan Hasil Uji Validitas
5.	Uji Reliabilitas
6.	Uji Multikolinierita
7.	Uji Heterokedastisita
8.	Surat Izin Penelitian
9.	Surat Balasan atas Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memang pajak sudah lama menjadi momok bagi banyak orang. Karena memang bagaimanapun pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Manfaatnya pun tidak terasa langsung dan sifatnya memaksa sehingga orang merasa terpaksa membayarnya. Belum lagi dengan maraknya kasus korupsi dan pemborosan uang negara membuat masyarakat makin jengah membayar pajak. Apalagi bila masyarakat tidak melihat adanya subsidi sosial untuk menghindari kesenjangan pendapatan di masyarakat dari negara, masyarakat akan lebih memilih membayar zakat ataupun sumbangan pada lembaga sosial dan keagamaan yang lebih mereka percaya daripada menyisihkan sebagian hartanya untuk negara.

Yudkin (1978) menyatakan masalah yang mendasar bagi administrasi pajak di negara berkembang adalah rendahnya pendidikan masyarakat sehingga sulit bagi mereka untuk mengadministrasikan pajaknya sendiri (*self assesment*) namun negara berkembang juga tidak mempunyai aparat perpajakan dan teknologi yang memadai untuk kelengkapan dan akurasi data perpajakan untuk menetapkan pajak bagi tiap individu dan badan (*official assesment*).

Di Indonesia, administrasi pajak merupakan campuran dari *self assesment* dan *official assesment*. *Self assesment* diterapkan pada administrasi Pajak

Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana perhitungan pajak dan pelaporannya dibuat sendiri oleh Wajib Pajak (WP). Memberikan hak kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengalami akses timbal balik yang langsung dirasakan masyarakat dengan keikutsertaannya secara aktif dalam membayar pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak (WP) merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*.

Sedangkan *official assesment* diterapkan pada PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan) dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu nilai estimasi harga properti yang ditentukan oleh kantor pajak.

Baik sistem *self assesment* maupun *official assessment* yang diterapkan terurama di Indonesia telah menimbulkan masalah keadilan di antara sesama pembayar pajak. Dalam sistem *self assesment*, sistem pengawasan pajak yang lemah telah mendorong para pengusaha kelas kakap merancang suatu perencanaan pajak yang baik bahkan rekayasa laba yang rapi untuk mengelabui pihak fiskus. Contoh saja, banyak BUMN dan perusahaan besar seperti Bakrie Group yang tunggakan pajaknya belum terbayar. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha kecil yang taat pajak, mungkin saja fenomena ini malah mendorong mereka membangkang dari aturan pajak. Dalam *official assesment*, masyarakat seringkali merasa penentuan pajaknya tidak masuk akal. Contohnya pada kasus PBB, banyak masyarakat bingung karena rumahnya sudah tua dan bobrok tapi nilai jualnya (NJOP) naik terus dari tahun ke tahun.

Masalah lainnya adalah minimnya sosialisasi ke masyarakat mengenai pajak. Misalnya soal keberatan, banyak sekali masyarakat yang ingin keberatan masalah PBB karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatannya. Karena tidak tahu, kebanyakan mereka membayar sekenanya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun. Itupun tidak ada reaksi dari kantor pajak, mereka cenderung mendiamkan saja. Adapula yang karena takut diperiksa, selalu melapor SPT PPh kurang bayar padahal Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan lebih bayar dan berhak atas restitusi kelebihan bayar pajaknya.

Memang proses restitusi juga lama dan berbelat-belit malah akhirnya membuat biaya dan waktu yang dikorbankan lebih besar bagi Wajib Pajak (WP). Namun apakah adil bila Wajib Pajak (WP) sudah merugi tapi tetap membayar pajak. Wajib pajak (WP) orang pribadi pun juga banyak yang tidak mengerti melapor SPT PPh sehingga membebankan kewajiban melapor pada pemungut PPh 21-nya. Saat PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang ditentukan UU PPh sangat minim bahkan pegawai kecil seperti OB dan satpam pun harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar tidak terkena pajak lebih besar 20%. Namun apakah mereka yang pendidikannya kadang ada yang di bawah SMA mengerti masalah pelaporan perpajakan. Pajak yang mereka sumbangkan pun seberapa, namun karena jumlah mereka sangat banyak, mengapa malah membuat beban administrasi yang besar bagi pemungut bahkan bagi pihak fiskus sendiri.

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini bukannya membuat pihak fiskus memintarkan para wajib pajak (WP) malah cenderung memanfaatkan situasi ini

untuk menaukut-nakuti wajib pajak (WP). Terutama saat pemeriksaan, wajib pajak (WP) yang tidak melakukan pembukuan secara formal dicecar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan hanya berdasarkan asumsi dan kecurigaan pihak fiskus semata. Terkadang pun peraturan yang berlaku tidak jelas dan rancu, sehingga pihak fiskus dapat semena-mena menentukan mana yang menurutnya lebih menguntungkan pihak fiskus terutama bagi Wajib Pajak (WP) kecil yang kurang pengetahuan pajaknya.

Misalnya tidak boleh mengasuransikan pesangon karyawan, iuran hansip dianggap sumbangan. Pihak fiskus pun tak semuanya pintar dalam ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga malah membodohi Wajib Pajak (WP) dan masyarakat, yang paling memalukan mungkin adalah kasus memajaki DTA (*deferred tax asset*) yang nyata-nyata tidak ada hubungan dengan laba rugi sebelum pajak (lebih jelasnya pada PSAK 46)

Dari masalah-masalah diatas yang membuat pajak itu menjadi momok bagi wajib pajak timbul beberapa kasus ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) dalam perpajakannya. Hal ini dibenarkan oleh direktorat jendral pajak dimana, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 370.000 wajib pajak atau WP sebagai target utama optimalisasi penerimaan pajak karena tergolong bermasalah, seperti menunggak dalam jumlah besar. Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dibentuk secara khusus untuk memaksimalkan penerimaan negara dari mereka.

"Penetapan wajib pajak (yang masuk dalam target Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak atau TOPP) itu didasarkan atas hasil penelitian kami. Ada

kriteria-kriterianya," kata Sekretaris Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah pekan lalu di Jakarta. Menurut Syarifuddin, Wajib Pajak (WP) yang dikejar TOPP adalah orang-orang yang terindikasi telah melakukan berbagai pelanggaran perpajakan. Pengejaran tersebut telah didahului proses audit yang dilakukan untuk menetapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajibannya. "Wajib Pajak (WP) yang patuh tidak kami audit,"

Catatan Ditjen Pajak menyebutkan, nilai penagihan atas 370.000 wajib pajak mencapai Rp 20 triliun, baik Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan. Hingga 30 September 2006, TOPP baru menyelesaikan penagihan atas 131.563 Wajib Pajak (WP) dengan nilai Rp 4,65 triliun atau sekitar 25,33 persen dari total penagihan.

Untuk menghimpun tunggakan tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan instruksi bukti permulaan sebanyak 45 dokumen sebagai syarat awal pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP) bermasalah itu. Mulai Januari hingga September 2006, terdapat 141 kali pemblokiran rekening milik wajib pajak bermasalah dan 166 kasus pencegahan, dilarang keluar dari Indonesia sebelum menyelesaikan tunggakannya yang mencapai di atas Rp 100 juta.

Total uji kepatuhan Wajib Pajak (WP) hingga September 2006 mencapai 52.222 kasus atau menurun 54,8 persen dibandingkan dengan pemeriksaan tahun 2005 yang mencapai 115.514 kali uji kepatuhan. Sementara jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Ditjen Pajak mencapai 11 juta, terdiri atas 9,8 juta Wajib Pajak (WP) pribadi dan 1,2 juta Wajib Pajak (WP) badan. Sebagian dari Wajib

Pajak (WP) tersebut tengah diteliti ulang keakuratan datanya karena terjadi kepemilikan nomor pokok wajib pajak ganda.

Syarifuddin mengatakan, pemeriksaan pajak diarahkan pada Wajib Pajak (WP) yang menonjol, antara lain yang meminta pengembalian pajak lebih bayar atau restitusi. Dasar pemeriksaan bisa ditetapkan atas hasil penelitian atau ditunjuk secara acak dari pusat data Ditjen Pajak yang telah dikomputerisasi. "Pemeriksaannya tergantung perkembangan. Kalau memang kasusnya berat, pemeriksaannya secara lebih mendalam. Kami tidak menargetkan jumlah penerimaannya, tetapi memeriksa semua yang bermasalah. Kalau terbukti tidak benar, kami hitung utangnya," ujar Syarifuddin.

Selain itu terjadi juga permasalahan lainnya yaitu penggelembungan data, dan Presiden Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* Fadhil Hasan mengingatkan, yang perlu diwaspadai dari laporan penerimaan pemerintah adalah penggelembungan data. Ada kenaikan realisasi penerimaan secara drastis, yakni dari Rp 507 triliun pada November 2006 menjadi Rp 637,8 triliun per 29 Desember 2006, atau naik Rp 130,8 triliun hanya dalam satu bulan. "Data itu mencengangkan. Apakah data itu memang sesuai kondisi sebenarnya. Kalau benar, apakah masuk akal. Perlu diwaspadai kemungkinan adanya akrobat data," katanya. (kompas, 15 januari 2007) .

Tidak hanya itu berdasarkan undang-undang pajak sekarang ini, Wajib Pajak (WP) tunduk pada tarif denda yang sangat tinggi di mana kurangnya pajak diketahui dalam serangkaian audit pajak. Denda yang penting juga berlaku jika

pembayaran pajak yang kurang diungkap secara sukarela oleh seorang Wajib Pajak (WP) (walaupun pada umumnya denda ini lebih rendah dari pada kasus audit pajak). Dengan kata lain, jika seorang Wajib Pajak (WP) melaksanakan sebuah tinjauan tentang masalah pajaknya dan mengenali bahwa ia telah membayar pajak dalam jumlah kurang, maka ada sebuah insentif terbatas bagi para Wajib Pajak (WP) untuk mengungkap pembayaran pajak yang kurang tersebut kepada DJP. Bahkan, Wajib Pajak (WP) akan seringkali tergoda untuk tetap membisu tentang pembayaran pajak yang kurang itu, dan dalam kasus itu ia tidak tunduk pada audit pajak yang kemudian atau jika diaudit, pembayaran pajak yang kurang itu tidak diketahui, maka Wajib Pajak (WP) seringkali lebih baik keadaannya.

Sebuah sistem yang lebih baik membuat seorang Wajib Pajak (WP) mendapatkan diskon besar dalam dendanya yang diterapkan pada pengungkapan sukarela pembayaran pajak yang kurang dibandingkan dengan pembayaran pajak yang kurang yang diketahui sebagai akibat dari sebuah audit pajak. Denda-denda yang diterapkan dalam serangkaian audit pajak harus didasarkan pada sebuah skala geser, dan mencerminkan derajat kesalahan yang menyebabkan pembayaran pajak yang kurang.

Denda-denda harus dikurangi secara signifikan di mana para Wajib Pajak (WP) telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, atau bekerjasama selama audit pajak dilakukan, misalnya dengan cara memberikan pengungkapan secara sukarela setelah audit dimulai. Sebaliknya para Wajib Pajak (WP) harus tunduk

pada denda yang lebih tinggi atas kegagalan bekerja sama selama proses audit, atau jika pembayaran pajak yang kurang merupakan akibat dari penipuan yang disengaja atau pembayaran pajak yang kurang.

Jika seorang Wajib Pajak (WP) melakukan pengungkapan sukarela atas sebuah pembayaran pajak yang kurang, maka dalam kebanyakan kasus, satu-satunya pajak tambahan yang berlaku harus menjadi sebuah biaya bunga berdasarkan komersialitas (bukan tarif tetap sebesar 2% bunga per bulan berdasarkan sistem sekarang ini yang dapat menyamakan tarif denda yang sangat tinggi).

Hal ini mendorong para Wajib Pajak (WP) untuk meninjau kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak menurut undang-undang, dan jika pembayaran pajak yang kurang berhasil diketahui, agar melakukan sebuah pengungkapan sukarela. Sebaliknya, hal ini berarti bahwa para Wajib Pajak (WP) yang jujur didorong untuk melaporkan semua pajaknya yang telah jatuh tempo dan memperbaiki kesalahan secara jujur. Hal ini meningkatkan pelaksanaan sebuah sistem penilaian diri yang mendasarkan diri pada kepatuhan sukarela agar dapat berjalan.

EuroCham mengakui bahwa penting untuk mendorong para Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan pembayaran singkat pajak sebagai alternatif dalam mendapatkan kredit melalui para pemberi pinjaman komersial, dan oleh karena itu denda yang layak pada premi tarif bunga komersial harus dibebankan pada pembayaran pajak yang kurang misalnya sebuah marjin dari 5% per tahun, di atas

tarif bunga komersial, akan menghilangkan pembayaran pajak yang kurang sebagai sebuah alternatif dalam mendapatkan kredit dari para pemberi pinjaman.

Dari uraian permasalahan yang tampak seperti diatas maka peneliti merasa tertarik untuk membuat penelitian tentang “Pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR), terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan Beban PPh Tahunan Orang Pribadi”. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus kepada pada salah satu instansi pendidikan yang merupakan instansi nirlaba.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah ini pada:

- a. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?
- b. Apakah terdapat pengaruh Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?
- c. Apakah terdapat pengaruh antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi” untuk mengetahui:

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi
2. Apakah terdapat pengaruh Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan *self assessment system* yang dilaksanakan sejak lama tidak menutup kemungkinan bahwa para Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya melakukan tugasnya dengan benar, misalnya dalam perhitungan beban pajak yang ditanggungkan oleh para Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu dibutuhkan peran dari *account representative* (AR) untuk membimbing para Wajib Pajak (WP) yang kurang mengerti masalah perpajakan dan membantu para Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) yang patuh.

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* (AR) adalah untuk memperbaiki individu Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak ada alasan lagi untuk para Wajib Pajak (WP) merasa kesulitan dalam melaksanakan perhitungan beban pajaknya sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam pelaksanaan *self assessment system* karena dibantu dengan peran *account representative* (AR) untuk menciptakan Wajib Pajak (WP) yang patuh dalam menyetorkan beban PPh tahunan. Bagi para dosen dan karyawan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambajan ilmu pengetahuan dan membuat gambaran bahwa perhitungan pajak yang dilakukan secara individu sebenarnya tidak begitu sulit karena dibantu oleh peran *account representative* (AR) dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dosen dan karyawan sebagai Wajib Pajak (WP).

Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana cara menciptakan kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk lebih tinggi dalam menjalankan kewajibannya yang dilihat dari keinginan dan kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Definisi umum tentang pajak menurut para pakar hukum dan perpajakan, yang diantaranya adalah:

1. Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Widi Widodo dan Dedy Djefris: 2008)
2. Menurut Rochmat Soemitro (2008: 30) dalam buku Widi Widodo dan Dedy Djefris, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Widi Widodo dan Dedy Djefris: 2008)

3. Menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya *An Introduction to Taxation*: menyebutkan pajak sebagai, *any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives.*

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Siti Kurnia Rahayu: 2010)

2.1.1.2. Ciri-ciri Pajak

Setelah kita mengetahui definisi mengenai pajak, maka kita perlu juga mengetahui bagaimana ciri-ciri pajak. Dari beberapa definisi dan pemahaman pajak diatas dapat ditemui beberapa ciri pajak. Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:14) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara

lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.

- c. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) secara langsung.
- d. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan beberapa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mohammad Zain (2005: 12) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (WP).

- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi dalam pajak merupakan suatu definisi fungsi sebagai kegunaan suatu hal yang merupakan kegunaan pokok atau manfaat pokok pajak. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Dilihat dari definisi dan ciri-ciri pajak terlihat seakan pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* atau Fungsi Penerimaan

Fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan ini merupakan penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *budgetair* seperti yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 26) menyatakan bahwa:

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana

secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi *budgetair* seperti yang ditulis oleh Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 28) menyatakan bahwa:

Ditinjau dari fungsi *budgetair*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran-pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan atau transfer ke daerah.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur

Sedangkan fungsi *regulerend* yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 29) menyatakan bahwa:

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 28) menyatakan bahwa:

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan antara lain sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan. Fungsi ini banyak ditunjukkan kepada sektor swasta, misalnya sebagai insentif investasi barang modal atau alokasi industri daerah tertentu.

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *regulerend* berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4. Penggolongan Jenis Pajak

Masyarakat Indonesia memiliki penghasilan yang berbeda-beda, ada yang berpenghasilan tinggi sehingga daya beli pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah. Dengan penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 50), terdapat perbedaan atau penggolongan serta jenis-jenis pajak. Perbedaan dan penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria yaitu;

- Siapa yang membayar pajak

- Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak
- Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain
- Siapa yang memungut pajak
- Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan
- Pajak dikenakan atas apa

1. Menurut Golongannya

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya, maka pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya menjadi dua jenis. Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 50) adalah:

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak langsung yaitu beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

Dari penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak

dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP), sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

Pengelompokan pajak menurut sifatnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 51) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materilnya. Seperti status kawin, tidak kawin dan kawin dengan tanggungan
- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung pada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Memperhatikan objek bukan benda yang dapat berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. seperti bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya berjudul Perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official assesment system*
2. *Semi self assesment system*
3. *Full self assesment system*
4. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah:

1. *Official assesment system*

Dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2. *Semi self assesment system*

Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Pada awal tahun pajak, Wajib Pajak (WP) menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983

3. *Full self assesment system*

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. fiskus tidak campur tangan

dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak (WP) tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983

4. *With holding system*

Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. dilaksanakan secara efektif sejak 1984

2.1.2. *Self Assessment System*

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan reformasi perpajakan (*firs tax reform*) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan di Indonesia. Pembaharuan sistem di indonesia diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak (WP) ataupun fiskus. (Rahayu, 2010 : 99).

Seiring dengan berkembangnya kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Didalam memenuhi kebutuhan dari pembiayaan pemerintah salah satu perubahan telah dilakukan oleh DJP adalah ketentuan mengenai tata cara perpajakan atau prosedur perpajakan dari pajak

penghasilan terutama serta bagaimana tata cara menyetor dan mempertanggung jawabkan kewajibannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 101) menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak (WP) tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

Menurut Rinsky K. Judisseno (2005 : 27) *self assessment system* merupakan sistem pembayaran pajak yang berlaku dan dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak (WP) boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* didefinisikan sebagai seperangkat proses dimana Wajib Pajak (WP) dalam sistem ini harus berperan aktif dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Dinamakan *self assessment system* dimana wajib pajak (WP) yang menerima atau memperoleh penghasilan, menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan membayarnya ke kas negara. Lalu melaporkan

perhitungannya dan pembayaran pajaknya tersebut ke aparat pajak/ kantor pelayanan pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak (WP) terdaftar.

Self assessment ini dipilih karena sangat sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memungkinkan partisipasi aktif dari pembayar pajak tanpa menunggu campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, tugas dan fungsi aparat pajak menjadi pasif dan berperan sebagai pembina, pengawas dan pelaksana hukum bagi pelanggar.

Peningkatan penerimaan pajak, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan menciptakan stimulus fiskal bagi bergeraknya roda kegiatan perekonomian indonesia.

2.1.2.1. Pengertian *self assesment system*

Self assesment system adalah menilai atau menghitung sendiri. Maka dapat diartikan bahwa Wajib Pajak (WP) sendiri yang menilai dan menghitung pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 101) menjelaskan bahwa, *self assesment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, dengan cara:

- Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi atau kantor pos
- Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) baik dan benar

Maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak dengan *self assesment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya. mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (WP).

2.1.2.2. Ciri-ciri Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 102) adapun ciri-ciri dari *self assesment system* adalah:

1. Wajib Pajak (WP) (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Wajib Pajak (WP) adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan

bagi Wajib Pajak (WP), melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku”

2.1.2.3. Keuntungan dan kelemahan pelaksanaan *self assessment system*

Keuntungan dan kelemahan pelaksanaan *self assessment system* menurut Tarjo dan Indra Kusumawati (2006 : 120) berpendapat bahwa:

1. Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan oleh pemerintah (*Fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberihak kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak (WP) berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak (WP) melaporkan pembayaran dan seberapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan

2. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan.

Menurut artikel Direktorat Jenderal Pajak tanggal 27 November 2007, sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak (WP) mempunyai kewajiban

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak (WP) dengan mengisi formulir pendaftaran yang melampirkan persyaratan administrasi.

Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak (WP) dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak.

Dianutnya *self assessment system* diharapkan bahwa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya.

2.1.2.4. Syarat keberhasilan pelaksanaan *self assessment*

Dalam pelaksanaan *self assessment* yang diterapkan di Indonesia mempunyai asumsi keberhasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jika masyarakat sendiri mempunyai itikad baik, tingkat pendidikan, pengetahuan, kejujuran, dan profesionalisme.
2. Adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dan rasa keadilan yang baik dalam menyelenggarakan sistem *self assessment* pajak.
3. Jika administrasi pajak sederhana perhitungannya dan tidak sulit bagi Wajib Pajak (WP).

4. Jika *self assessment* pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika sisten *self assessment* didukung oleh politik, ekonomi, norma, *believe*, *values*, birokrasi atau *tax payer* yang baik.
6. Jika kepemimpinan birokrasi memberikan pelayanan masyarakat yang memuaskan dan *tax payer* turut serta mendukung program pemerintah
7. Sistem pengendalian (internal) birokrasi dan *tax payer* berjalan dengan prosedur
8. Sistem akuntabilitas birokrasi dan *tax payer* yang baik, memadai dan transparan.

2.1.2.5.Indikator Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 102), dalam mendukung pelaksanaan *self assessment system* adalah:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak (WP) dapat langsung mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melakukan e-register untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak, mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu mengurangi pajak terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (WP)
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak (WP)

Pelaporan pajak berupa surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak (WP) terdaftar.

Kewajiban Wajib Pajak (WP) di atas didukung juga oleh undang-undang perpajakan yang mewajibkan para Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak dan titik tumpunya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) ini merupakan kunci dari keberhasilan dalam pemungutan pajak secara *self assessment*.

2.1.3. Account Representative (AR)

2.1.3.1. Pengertian Account Representative (AR)

Suatu yang baru yang kita temui di Kantor pelayanan Pajak (KPP) modern saat ini adalah keberadaan *account representative* (AR). *Account representative* (AR) merupakan jabatan baru yang diperkenalkan dalam struktur organisasi modern DJP RI. *Account representative* (AR) berada pada seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ada sekitar empat seksi Waskon ini dengan jumlah *account representative* (AR) untuk setiap seksi berkisar delapan orang. Masing-masing *account representative* (AR) memegang beberapa Wajib Pajak (WP) tergantung jumlah Wajib Pajak (WP) pada KPP tersebut.

Pembentukan administrasi perpajakan modern mendapat sambutan baik dari kalangan konsultan pajak. Niat pemerintah meningkatkan intensitas komunikasi dua arah yang setara, antara fiskus dan Wajib Pajak (WP), melalui peran *account representative* (AR). Setiap Wajib Pajak (WP) dapat berhubungan langsung

dengan *account representative* (AR). Salah satu tugas *account representative* (AR) adalah memberikan konsultasi secara gratis pada Wajib Pajak (WP) yang memerlukan.

Pengertian *account representative* (AR) menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan konsultasi, dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak (WP) tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 161/KM.1/2005 dalam modul diklat sistem Administrasi Perpajakan Modern (2006 : 12) yang dikutip dalam jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2. No. 1 (2010 : 29) yang dimaksud dengan *account representative* (AR) adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan petunjuk dan membantu Wajib Pajak (WP) dalam semua urusan perpajakan dan konsep *account representative* (AR) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) berdasarkan sektor usaha tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor. 98/KMK.01/2006 yang dikutip dalam jurnal ekonomi dan industri Vol. 16. No. 2 (2011: 73) menyatakan bahwa *account representative* (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *account representative* (AR) adalah seorang yang dipilih atau ditugaskan mewakili (lembaga) untuk menyuarakan suatu untuk memberikan layanan tertentu.

2.1.3.2. Tugas *Account Representative* (AR)

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang harus dilakukannya, *account representative* (AR) memiliki aturan-aturan pelaksanaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan. Dibawah ini merupakan beberapa tugas dari *account representative* (AR) yang dikutip dalam jurnal ekonomi dan industri Vol. 16. No. 2 (2011: 73) yaitu:

1. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK. 01/2006
 - Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (WP).
 - Bimbingan/Himbauan kepada Wajib Pajak (WP) dan konsultasi teknis perpajakan.
 - Penyusunan profil Wajib Pajak (WP) dan analisis kinerja Wajib Pajak (WP) serta rekonsiliasi data wajib dalam rangka intensifikasi.
 - Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Menurut Liberti Pandiangan (2008)
 - Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan.
 - Bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).

- Analisis kinerja Wajib Pajak (WP), rekonsiliasi data Wajib Pajak (WP) dalam rangka intensifikasi.
- Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (WP) melalui pemanfaatan data dan sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) atau sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
- Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Membantu Wajib Pajak (WP) dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan.
- Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP) dan membuat *company profile*.
- Menginformasikan ketentuan pajak terbaru kepada Wajib Pajak (WP).
- Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak (WP).

2.1.3.4. Syarat profesionalisme *Account Representative* (AR)

Yang harus ada dalam diri seorang *account representative* (AR) dalam Indonesian *Tax Riview* Edisi 7 (2008 : 9) antara lain:

1. Kriteria Pendidikan

Seorang calon petugas *account representative* (AR) harus berpendidikan minimal D3 sampai S1.

2. Kriteria Pangkat/Golongan

Pangkat atau golongan yang dibutuhkan untuk menjadi *account representative* (AR) adalah minimal III/a atau golongan Penata Muda.

3. Kriteria Pengalaman Kerja

Untuk menjadi seorang *account representative* (AR), seorang petugas pajak harus memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun. Dengan pengalaman kerja minimal tersebut, harapan petugas terkait sudah cukup menguasai teknis perpajakan.

4. Kriteria *Attitude* (Tingkah Laku)

Ini adalah salah satu kriteria yang penting untuk menjadi *account representative* (AR). Kriteria ini menurut petugas terkait agar memiliki komitmen yang tinggi terhadap kode etik, sopan, tidak emosional dan memiliki semangat bekerja yang tinggi (*Inovativ*, kreatif, komunikatif, *responsif*) dan menjaga kerahasiaan jabatan.

5. Kriteria *Skills* (kemampuan)

- a. Menguasai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak (WP).
- b. Memahami karakteristik perusahaan dan industri Wajib Pajak (WP).
- c. Melakukan analisis data dan potensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber.
- d. Memberikan pelayanan prima
- e. Berkomunikasi baik dengan Wajib Pajak (WP).

6. Kriteria Penanganan Tugas

- a. Membangun komunikasi efektif dengan Wajib Pajak (WP) yang menjadi tanggung jawabnya melalui e-mail/telepon.
- b. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

2.1.3.5. Ciri-ciri *Account Representative* (AR)

Ciri-ciri *account representative* (AR) yang dikutip dalam jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2. No.1, Ananta Pratama (2010 : 28) adalah sebagai berikut:

1. Mengenal secara baik sektor usaha Wajib Pajak (WP) yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan pengawasan prima karena *account representative* (AR) menguasai bidangnya.
3. Memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak (WP) secara dini agar terhindar dari sanksi perpajakan.
4. Menginformasikan ketentuan-ketentuan pajak terkini.
5. Setiap *account representative* (AR) bertanggung jawab atas sejumlah Wajib Pajak (WP) tertentu.
6. Memiliki akses terhadap rekening (*taxpayer's account*) dan *data base* Wajib Pajak (WP).

2.1.3.6. Indikator *Account Representative*

Menurut Amilin & Nina Anisah (2008 : 145) indikator dari *account representative* (AR) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Peran *account representative* (AR) dalam melakukan pengawasan dalam pembuatan nota perhitungan penerbitan surat tagihan pajak, surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh , penyeteroran pajak dan pelaporan SPT masa dan tahunan, serta pemeriksaan dan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelayanan

Pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) meliputi pemberian himbauan mengenai kewajiban pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) masa dan Tahunan serta mengenai pelunasan tunggakan pajak, selain itu juga memberikan pelayanan dalam membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Ps.25.

3. Konsultasi

Konsultasi yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) menyangkut ketentuan perpajakan dan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau telepon.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak (WP) dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Machfud Sidik (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 138) mengemukakan bahwa, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung

jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Safri Nurmantu (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh . Zain : 2004) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan”, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak (WP) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Wajib Pajak (WP) sangat dibutuhkan keaktifannya dalam mendukung pelaksanaan sistem yang dijalankan, berusaha menjadi pribadi yang jujur tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mendaftarkan diri secara sukarela sebagai Wajib Pajak (WP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini akan menjadi pendukung penerimaan negara disektor perpajakan.

2.1.4.1. Kepatuhan Sebagai Fondasi *Self Assessment*

Menurut Iswan (dalam Ni Luh Supadmi, 2009 : 216), kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila element-elemen kunci telah diterapkan secara efektif.

Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (WP).
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak (WP)
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi efektif

Dalam hal memenuhi kewajiban para Wajib Pajak (WP), para aparat pajak pun ikut berpengaruh atas bagaimana perlakuan aparat pajak kepada para Wajib Pajak (WP). Semua hal yang bersifat positif dalam melayani Wajib Pajak (WP) akan berpengaruh pada tingkat keinginan atau kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan penghasilan tahunan.

2.1.4.2. Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan

2. Kepatuhan Material

Merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi

dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Dalam penyampaian batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan melaporkannya sebelum tanggal batas akhir pelaporan SPT maka Wajib Pajak (WP) memenuhi ketentuan formal. Dan apabila dikatakan sudah memenuhi kepatuhan material, jika Wajib Pajak (WP) mengisi dengan jujur, lengkap, dan melaporkan sebelum batas waktu akhir.

2.1.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*)

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang dikutip oleh Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis dalam buku Dimensi Ekonomi Perpajakan (2012: 95). Hasil penelitian diarahkan pada dua pendekatan dari kepatuhan, yaitu;

1. Perspektif Ekonomi

- a. Beban keuangan, ada hubungan antara jumlah pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan (*financial burden, there appears to be a relationship between the amount of tax owed and compliance behavior*)
- b. Biaya jepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya (*the cost of compliaance, tax payer appear to face a number of common cost of having to comply with their tax obligation over and above the actual amount*)

- c. Hambatan, Wajib Pajak (WP) yang patuh menghendaki adanya denda terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh (*disincentive, studies has shown that those who are compliant want those who are non-compliant to be punished*)
- d. Pendorong, memberikan Wajib Pajak (WP) insentif akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (*incentives, giving taxpayer incentives may have a positive effect on compliance behavior*)

2. Prilaku yang menitik beratkan pada riset dari disiplin psikologi dan sosiologi

- a. Perbedaan individu; faktor-faktor individu mempengaruhi perilaku termasuk; umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, moral, industri, kepribadian, lingkungan dan beban resiko.
- b. Perasaan ketidakadilan, Wajib Pajak (WP) merasakan sistem yang tidak jujur atau berpengalaman diperlakukan tidak jujur cenderung kurang patuh.
- c. Persepsi resiko rendah; jika Wajib Pajak (WP) punya kesempatan untuk tidak patuh, maka ia akan ambil resiko untuk tidak patuh.
- d. Pengambilan resiko; sementara masyarakat ada yang berpandangan bahwa menghindar pajak adalah permainan untuk dilaksanakan dan berhasil.

2.1.4.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010 :139) , bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak (WP) pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak (WP) yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.4.4. Indikator Dalam Kepatuhan Pajak

Dalam praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 2008 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam Timbul Hamonang Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012 : 103) , Indikator kepatuhan Wajib Pajak (WP) antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek Ketepatan Waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

2. Aspek *Income* atau penghasilan Wajib Pajak (WP), sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan sikap yang sangat penting bagi para Objek Pajak untuk melaporkan apa yang menjadi kewajiban para Wajib Pajak (WP). Hal ini dapat berpengaruh positif dalam mendorong kemajuan ekonomi sebagai upaya menekan peningkatan investasi pemerintah serta melakukan transfer sumber-sumber ekonomi masyarakat menjadi penerimaan pemerintah.

2.2. Riview Penelitian Relevan

Tabel 2.1

Riview Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Yulianto (2009)	Pengaruh Kebijakan <i>Self Assessment System</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung	Hasil analisis membuktikan bahwa indikator dalam penelitian ini memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Namun keberhasilan kebijakan <i>self assessment system</i> dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang optimal harus dibarengi dengan memperhatikan isi kebijakan serta sistem nilai yang dianut atau yang melekat pada wajib pajak pembuat dan pelaksana kebijakan perpajakan
2	Aryo (2007)	Efektifitas Kepatuhan Sistem <i>Self Assessment</i> Pajak Penghasilan (pph) dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak pada KPP Jakarta Cilandak	Hasil penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> mempunyai pengaruh yang signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Jakarta Cilandak
3	Rezki Suhairi Suwandi (2008)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Pada KPP Pratama Bandung	Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan <i>self assessment system</i> yang

			mulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak sendiri, meski secara keseluruhan pelaksanaan <i>Self Assessment system</i> berjakan cukup, tetapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus
4	Tarjo & Indra Kusumawati (2006)	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> : Suatu Study di Bangkalan	Hasil penelitian di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang belum menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo. Untuk fungsi melapor Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsinya, namun mereka melapor bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda
5	Amilin & Nina Anisah (2008)	Pengaruh Persepsi Peran <i>Account Representative</i> Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran <i>Account Representative</i> yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua Jakarta belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

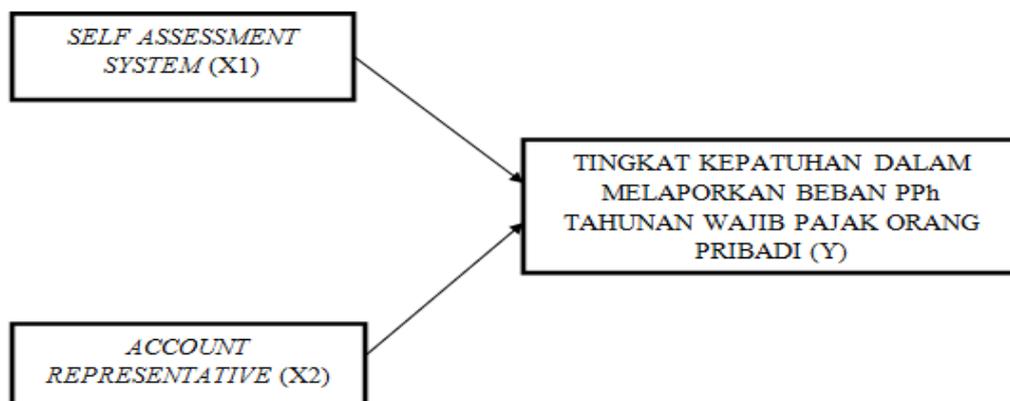
			hanya variabel pelayanan yang memberikan pengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel konsultasi dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
6	Zulkarnaen (2011)	Peranan pelaksanaan tugas <i>Account Representative</i> dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Dua	Dari hasil penelitian tersebut terdapat adanya pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya modernisasi perpajakan yang ditandai dengan adanya <i>Account Representative</i> dapat dilihat dari jumlah SPT yang masuk yaitu adanya peningkatan setelah tahun 2007 hingga tahun 2009.
7	Ni Luh Supadmi (2009)	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan	Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta (2007)	Strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem

			<p>pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegritas dan terjamin kerahasiaannya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.</p>
--	--	--	--

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari masalah yang ada serta penjabaran mengenai permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:



2.4. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi
- H2: Terdapat pengaruh Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi
- H3: Terdapat pengaruh antara pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (RA) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi pada dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta. Objek penelitian mengacu pada seluruh dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ruang lingkup pada dalam penelitian ini adalah para dosen dan karyawan yang termasuk wajib pajak (WP) yang merasakan langsung keberadaan *Account Representative* (AR) dengan sistem pelaksanaan *self assessment*.

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah *self assessment system* dan *account representative* (AR) dan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi. variabel independen dalam penelitian ini adalah *self assessment system* dan *account representative* (AR), sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi sebagai variabel dependen.

3.2. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah dosen dan karyawan yang bekerja pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

3.3. Operasional Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya (Iqbal, 2008:227). Dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Pribadi”

3.3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Konseptual

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Definisi Operasional

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dilihat dari aspek ketepatan waktu, penghasilan, pengenaan sanksi dan dilihat dari aspek pembayaran. Indikator-indikator pada variabel dependen ini diproksi melalui besar persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para Wajib Pajak (WP) bersedia membayar kewajiban tanpa memperhitungkan besarnya penghasilan (sukarela) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilihat seberapa jujur para Wajib Pajak (WP) dilihat dari pengalaman (jika ada) dalam hal pengenaan sanksi.

Bagaimana seorang Wajib Pajak (WP) patuh dilihat dari sisi pembayaran, dalam hal Wajib Pajak (WP) tidak pernah melakukan penyelewengan dana pembayaran beban PPh Tahunan yang seharusnya di bayarkan.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel-variabel yang nilainya tidak bergantung pada variabel lainnya (iqbal, 2008: 227). Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah *self assessment system* dan *account representative (AR)*

3.3.2.1. Self Assessment System

1. Definisi Konseptual

Self assessment merupakan sistem dimana Wajib Pajak (WP) melakukan sendiri perhitungan beban PPh Tahunan yang harus di dibayarkan sebagai Wajib Pajak (WP) patuh. Dan hal ini juga sering dijadikan alasan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk melalaikan kewajibannya, karena belum semua Wajib Pajak (WP) mengerti akan perhitungan yang dilakukan secara individu.

2. Definisi Operasional

Seperangkat proses dimana Wajib Pajak (WP) dalam sistem ini harus berperan aktif dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara. Variabel ini diukur menggunakan indikator pengukuran yang dilihat dari bagaimana para Wajib Pajak (WP) mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.3.2.2. *Account Representative*

1. Definisi Konseptual

Account representative adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan layanan secara langsung kepada Wajib Pajak (WP) *account representative* sendiri berupa pengawasan, pelayanan seperti pemberian himbauan mengenai pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan serta mengenai pelunasan tunggakan pajak dan pelayanan dalam bentuk konsultasi mengenai masalah perpajakan. Sehingga *account representative* (AR) berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Tabel 3.1. Kisi - Kisi Indikator Variabel Penelitian dan Pengukurannya

No	Variabel	Indikator Variabel Penelitian	Indikator Pernyataan	Skala Pengukuran
1	<i>Self Assessment System</i>	1) Mendaftar 2) Menghitung 3) Menyetor (mengisi SPT, waktu pelaporan)	1-4 5-9 10-17	Likert
2	<i>Account Representative</i>	1) Pelayanan 2) Konsultasi 3) Pengawasan	18-22 23-26 27-31	Likert
3	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Pribadi	1) Ketepatan waktu 2) Pengenaan sanksi 3) Pembayaran 4) Income/penghasilan WP	31-34 35-39 40-42 43-44	Likert

Sumber : Data Diolah Sendiri Tahun 2012

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden kemudian diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Instrumen berjumlah 33 butir pernyataan, untuk mengukur pendapat responden yaitu menggunakan skala ordinal mulai dari 1 untuk sangat tidak setuju (STS) dan 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Dengan perinciannya sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dosen dan karyawan

yang pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3.6. Metode Analisis

3.6.1. Uji Validitas

Sugiyono (2004) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Validitas merupakan pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistic Package for Social Science*).

3.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 (Nunnally, 1994) maka kuisisioner tersebut dapat dipercaya untuk digunakan dalam suatu penelitian.

3.6.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : jenis kelamin, status perkawinan, lama bekerja di Universitas Negeri Jakarta, pendidikan, jabatan, lama responden memiliki NPWP. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi (Imam Ghozali;2011).

3.6.4. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Asumsi model linear klasik adalah data berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji gejala penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.6.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan secara grafik dan statistik sehingga dapat diketahui secara pasti bagaimana distribusi data yang diperoleh. Metode grafik yang handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat *probability plot*

dan histogram Grafik *probability plot* disimpulkan normal bila sebaran data berada di sekitar garis diagonal.

Sementara itu, grafik histogram disimpulkan normal bila bentuk histogram seperti bentuk lonceng (*bell shaped curve*). Disamping dengan menggunakan grafik, uji normalitas data dapat dilakukan secara statistik, yaitu dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan terdistribusi secara normal bila nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2011).

3.6.4.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 dan *variance inflation factor* (VIF) ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.6.4.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* mengandung berbagai ukuran

(kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan grafik scatter plot dan uji glejser. Dalam uji glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat 5% terhadap residual, maka terjadi heterokedastisitas (Gunawan, 1996 dalam Jatmiko, 2006).

Apabila noktah (titik) dalam grafik membentuk pola menyebar lalu menyempit atau sebaliknya di sekitar garis diagonal (*funnel shape*) maka bisa dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar dengan tidak membentuk pola tertentu di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y (*clouds shape*) maka dikatakan terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.5. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis ini digunakan untuk pengujian hipotesis dan mengetahui hubungan antara variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan beban pajak penghasilannya (Y) dengan variabel bebasnya, yaitu *Self Assessment System* (X_1) dan *Account Representative* (X_2), dengan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

y = Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan beban pajak penghasilannya

α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk X_1 dan X_2

- X_1 = *Self Assessment system*
 X_2 = *Account Representative (AR)*
 e = *Error term*

3.6.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam bervariasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.6.7. Pengujian Hipotesis

3.6.7.1. Uji t

Dalam penelitian ini dilakukan uji t yang fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan parsial antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y), uji t ini agar dapat lebih mudah maka dapat digunakan SPSS 16.0 *For Windows*.

Setelah dilakukan analisa data maka langkah yang di tempuh selanjutnya adalah membandingkan nilai signifikansinya dengan taraf signifikansi (α) 0.05 dengan sampel (n).

a) Kriteria hipotesis

H_0 ; $\beta = 0$; tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

H_a ; $\beta > 0$; ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

b) Kriteria pengujian:

Jika nilai t hitung $>$ t tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Jika nilai t hitung $<$ t tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.7.2. Uji F

Sedangkan uji F dilakukan supaya mengetahui hubungan secara bersama-sama atau simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Uji F ini agar dapat lebih mudah maka dapat digunakan SPSS 16.0 *For Windows*.

Setelah itu dapat dibandingkan nilai signifikansinya dengan taraf signifikan 0.05 dari keterangan tersebut dapat disimpulkan apakah hipotesis nol (H_0) atau hipotesis alternatif (H_a) tersebut ditolak atau diterima. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya.

Dan kriteria ditolak atau diterima adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Nilai Kritis (F tabel)

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-F dengan tingkat signifikan (α) 5%, dengan sampel (N)

2. Pengujian Hipotesis

$H_0 ; \beta = 0$; tidak ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

$H_a ; \beta > 0$; ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

3. Kriteria Pengujian

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Unit Analisis/Observasi

4.1.1. Subjek Penelitian

Jumlah reponden yang dapat menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu 7 fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini difokuskan pada dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Negeri Jakarta dengan penerapan *self assessment system* yang dibantu dengan *account representative* (AR).

Aspek yang diteliti meliputi variabel pelaksanaan *self assessment system* (X1), peranan *account representative* (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (Y). data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 80 (delapan puluh) orang sebagai responden. Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian ini yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) orang dari 5 Fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta.

Jumlah ini telah sesuai kriteria sampel sebuah penelitian, roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (dalam Prof. Dr. Sugiyono, 2011), mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian minimal 30 sampel.

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang ikut serta dalam penelitian ini, dapat dengan melihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Distribusi Resonden Kuesioner

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Fakultas	1. FBS	22	27.5%
	2. FIS	18	22.5%
	3. FIP	15	18%
	4. FT	14	17%
	5. FK	11	15%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terhadap keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden itu sendiri.

Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban yang terdapat pada kuesioner. Dalam penelitian ini waktu penelitian terbatas serta waktu yang dimiliki responden sangat minim.

Tabel 4.2
Distribusi Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang dikirim	140
Total kuesioner yang kembali	118
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	22
Jumlah kuesioner yang direspon	98
Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan	18
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	80
Tingkat pengembalian kuesioner	84%
Tingkat pengembalian yang dapat digunakan	57%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Dari 140 kuesioner yang dikirimkan dan yang di sebar sendiri oleh peneliti, yang kembali sebanyak 118 kuesioner. Dari jumlah kuesioner yang kembali tersebut, hanya 98 kuesioner yang direspon dan 20 kuesioner yang tidak direspon atau tidak diisi. Sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 22 kuesioner.

Dari 118 kuesioner yang kembali terdapat 18 kuesioner yang tidak dapat digunakan hal ini dikarenakan data yang tidak lengkap atau tidak diisi, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam pengolahan data penelitian. Dengan demikian data yang dapat diolah sebanyak 80 buah kuesioner karena 80 kuesioner ini kembali ke cara lengkap oleh karena itu 80 buah kuesioner dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Pengujian Hipotesis

4.2.1.1. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. (Sugiyono: 168)

Untuk uji validitas, dilakukan dengan menggunakan 15 data responden yaitu disebar di dua fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yaitu fakultas ekonomi (FE) dan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA). Dari data yang telah disebar peneliti hanya dapat menggunakan 15 kuesioner dari responden untuk dijadikan bahan untuk uji validitas.

Dengan menggunakan uji dua sisi (two-tailed) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,482. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ dari r tabel atau lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.3

Instrumen Penelitian Berdasarkan Validitas

No	Sub Variabel	Jumlah Item	Valid	Tidak Valid
1	<i>Self Assessment System</i>	17	14	3
2	<i>Account Representative</i>	14	9	5
3	Kepatuhan Wajib Pajak	13	10	3
Jumlah		44	33	11

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Yang terlihat dari tampilan output SPSS 16 bahwa korelasi antara masing-masing indikator terdapat jumlah yang menunjukkan hasil yang signifikan. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 44 pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 33 pernyataan yang valid dan terdapat 11 pernyataan yang tidak valid.

Hasil uji menunjukkan bahwa untuk variabel *self assessment system* (X_1) yang berjumlah 17 item, dari 17 item yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ dibandingkan nilai r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 14 item dan nilai r hitung $<$ dibanding r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 3 item, yaitu dengan rincian item ke tujuh (-0.054), item ke delapan (-0.014) dan item ke tiga belas (0.490).

Untuk variabel *account representative* (X_2) yang berjumlah 14 item. Dari 14 item yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ di bandingkan nilai r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 9 item dan nilai r hitung $<$ dibandingkan nilai r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 5 item yaitu item ke dua puluh (0.218), item ke dua puluh dua (0.320), item ke dua puluh empat (0.170), item ke dua puluh lima (0.440) dan item ke dua puluh enam (0.380).

Dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang berjumlah 13 item, dari 13 item yang memiliki nilai item dengan nilai r hitung $>$ dibandingkan nilai r tabel dan dinyatakan valid sebanyak 10 item dan nilai r hitung $<$ dibandingkan nilai r tabel dan dinyatakan tidak valid sebanyak 3 item yaitu item ke tiga puluh tiga (-0.293), item ke empat puluh dua (0.274) dan item ke empat puluh tiga (0.225).

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas ini menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu variabel. Butir pernyataan dalam variabel dikatakan reliabel atau terpercaya apabila jawaban responden adalah konsisten atau stabil.

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *Cronbach alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0.60 jika suatu variabel memberikan nilai tersebut maka sudah pasti menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.933	.938	33

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel *self assessment system* (X1) dan *account representative* (X2) memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* variabel tersebut adalah (α) 93.8% yang berarti lebih besar dari 0.60. Kondisi ini memberi arti bahwa semua variabel X1 dan X2 dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.1.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maximum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencangan distribusi). (Imam Ghazali: 19)

Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan statistik deskriptif variabel-variabel *self assessment system*, *account representative* sebagai variabel independen, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. sebagai variabel dependen

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif *Self Assessment System*

Variabel	Ukuran	Teoritis	Empiris
<i>Self Assessment system</i>	Mean	42	48,4
	Maximum	70	64
	Minimum	14	18

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Tabel analisis statistik deskriptif diatas memberikan informasi bahwa variabel *self assessment system* (X1) dalam penilaian dari pada dosen dan karyawan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 48,4 dan berada diatas rata-rata nilai teoritisnya yaitu diperoleh dengan angka sebesar 42. Dengan nilai empiris diatas nilai teoritis tersebut menunjukkan bahwa dosen dan karyawan mengerti mengenai pelaksanaan *self assessment system*, dan mereka cukup baik menerapkan pelaksanaan *self assessment system* sebagai Wajib Pajak (WP) yang baik.

Dilihat dari lampiran 2 hasil kuesioner, terdapat 14 pernyataan pada variabel *self assessment system* (X1) dan pada pernyataan nomor 13 mendapatkan nilai tertinggi sebesar 316 yang berarti pernyataan nomor 13 menunjukkan sikap patuh dalam menyetorkan beban PPh tinggi walaupun alasan lain dikarenakan para Wajib Pajak (WP) memiliki rasa takut terhadap denda yang akan ditanggungkan apabila Wajib Pajak (WP) terlambat menyetorkan beban PPh. Sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu pernyataan nomor 3 dengan mendapatkan nilai sebesar 202 yang berarti para wajib pajak tidak memiliki kesulitan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif *Account Representative*

Variabel	Ukuran	Teoritis	Empiris
<i>Account Representative</i> (AR)	Mean	27	32,050
	Maximum	45	41
	Minimum	9	13

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Variabel *account representative* (AR) menunjukkan nilai rata-rata empiris yang diperoleh sebesar 32,050 dan nilai tersebut terdapat diatas rata-rata teoritis dengan nilai sebesar 27, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *account representative* para dosen dan karyawan sangat terbantu sebagai Wajib Pajak (WP).

Dilihat dari lampiran 2 terdapat 9 pernyataan mengenai *account representative*, dari 9 pernyataan tersebut yang memiliki jumlah paling tinggi

adalah pernyataan dengan nomor 21 dengan nilai sebesar 307 yang berarti bahwa dosen dan karyawan Universitas Negeri Jakarta sering mendapatkan informasi apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administrasi.

Sedangkan pernyataan nomor 20 merupakan pernyataan yang memiliki jumlah paling kecil, dengan nilai 226 yang berarti peran *account representative* dalam tugasnya untuk menghimbau para dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta memiliki tingkat yang rendah.

Tabel 4.7

Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Dosen dan Karyawan UNJ

Variabel	Ukuran	Teoritis	Empiris
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dosen dan Karyawan	Mean	30	36.3125
	Maximum	50	50
	Minimum	10	15

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dosen dan karyawan dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata secara empiris sebesar 36,3125 yang berada diatas nilai rata-rata teoritis dengan nilai 30. Dengan nilai rata-rata diatas 30 tersebut menunjukkan bahwa mereka cukup patuh dalam menyetorkan beban PPh tahunan.

Dilihat pada lampiran 2, rari 10 pernyataan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada dosen dan karyawan Universitas Negeri Jakarta, pernyataan nomor 24 dengan nilai tertinggi sebesar 320 yang berarti para dosen dan karyawan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

4.2.1.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para dosen dan karyawan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 80 orang dengan identitas sebagai berikut: jenis kelamin, status perkawinan, lama responden bekerja di Universitas Negeri Jakarta, pendidikan, jabatan dan lama responden memiliki NPWP.

1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8

Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	53	70%
	Perempuan	27	30%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 80 orang terdiri dari 70% adalah laki-laki dan 30% adalah perempuan. Terlihat dari ukuran responden menurut jenis kelaminnya, responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi penelitian ini dan dapat dikatakan juga dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa

laki-laki adalah kepala keluarga yang memiliki sumber penghasilan dan menanggung pajak atas penghasilan.

2. Status Perkawinan

Penggolongan responden menurut status perkawinan dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9

Distribusi Responden Menurut Status Perkawinan

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Status	Kawin	61	76%
	Tidak Kawin	19	24%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Terlihat dalam penelitian ini responden yang mengisi kuesioner lebih banyak berstatus sudah menikah (kawin) dengan presentase 76% dan yang belum menikah (tidak kawin) memiliki presentase sebesar 24%.

Dari keterangan persentase tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa para kepala keluarga membayarkan pajak keluarga yang dibebankan dengan cara melakukan perhitungan sendiri. Tetapi belum tentu seluruh responden (kepala keluarga) sudah menguasai perhitungan pajak perorangan yang menjadi anggota keluarganya, dan dalam situasi seperti inilah responden membutuhkan seorang *account representative* untuk mengarahkan responden dalam menghitung besaran pajaknya.

3. Lama responden bekerja di UNJ

Penggolongan responden menurut lamanya bekerja di UNJ dikelompokkan dalam tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Lama Responden bekerja di UNJ

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Lama Kerja di Universitas Negeri Jakarta	1. < 5 Tahun	25	31%
	2. 5-10 Tahun	22	27%
	3. 10-20 Tahun	17	21%
	4. > 20 Tahun	16	21%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Dilihat dari lama responden bekerja di UNJ prosentase terbesar adalah responden yang bekerja kurang dari 5 tahun (<5) yaitu sebesar 31%. Dan yang bekerja antara 5-10 tahun memiliki prosentase sebesar 27%. Sedangkan yang bekerja selama 10-20 tahun dan lebih dari 20 tahun (> 20) memiliki persentase sebesar 21%.

Dengan adanya data lama responden bekerja di UNJ dapat membantu peneliti memahami kapan responden mendapatkan NPWP setelah ia bekerja di UNJ karena dalam penelitian ini sering didapati responden yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun tetapi ia memiliki NPWP baru dalam waktu sekitar 1-5 tahun dan artinya responden memiliki permasalahan dalam perpajakannya atau bisa dikatakan responden pernah melakukan penghindaran pajak .

4. Pendidikan

Dalam penelitian ini hanya melibatkan responden yang memiliki tingkat pendidikan di atas SMA dan paling minimal D3, dan diikuti oleh tingkat pendidikan di atasnya seperti S1, S2 dan S3. Penggolongan responden menurut tingkat pendidikannya dikelompokkan dalam tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Pendidikan	1. S3	4	5%
	2. S2	12	15%
	3. S1	43	52%
	4. Lainnya	21	28%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa presentase responden dengan tingkat pendidikan yang tertinggi adalah responden yang berpendidikan sarjana dengan persentase sebesar 52% lalu tingkat presentase kedua yang berpendidikan dibawah S1 (lainnya atau D3) yaitu sebesar 28%, diikuti responden yang berpendidikan S2 yaitu 15% dan presentase terkecil adalah responden yang berpendidikan S3 yaitu sebesar 5%.

Dan hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan dan kemampuan yang memadai untuk memahami hak dan kewajiban. Dan dengan memiliki pendidikan yang tinggi seharusnya mereka mengerti tentang

pembayaran dan penyetoran pajak pribadinya. Ternyata mereka yang berpendidikan tinggi juga belum sepenuhnya mengerti tentang bagaimana penyetoran, pemotongan dan pembayaran tentang pajak pribadinya.

5. Jabatan

Jabatan responden dalam penelitian ini hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok jenis pekerjaan. Yaitu sebagai dosen dan karyawan yang bekerja di UNJ. Untuk mempermudah perbedaan jenis pekerjaan responden maka dapat dilihat dalam tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Jenis Pekerjaan Responden

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Jabatan	1. Dosen	39	48%
	2. Karyawan	41	52%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden adalah bekerja sebagai karyawan, yaitu sebesar 41% dan diikuti yang bekerja sebagai dosen sebesar 39%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengisi kuesioner bekerja sebagai karyawan. Rendahnya persentase dosen dalam mengisi kuesioner ini dikarenakan waktu penyebaran kuesioner yang terbatas dan tidak menetapnya dosen di tempat juga menjadi kendala utama dalam penelitian ini.

6. Lama responden memiliki NPWP

Dalam penelitian ini, lama responden memiliki NPWP dapat menggambarkan seberapa besar para Wajib Pajak dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak secara mandiri, dan lama responden memiliki NPWP dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13

Lama Responden memiliki NPWP

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Lama memiliki NPWP	1. < 1 Tahun	5	6%
	2. 1-5 Tahun	55	55%
	3. > 5 Tahun	30	39%
Jumlah		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Dilihat dari tabel diatas, terlihat responden yang lama memiliki NPWP adalah antara 1-5 tahun dengan prosentase sebesar 55%, yang memiliki NPWP lebih dari 5 tahun (>5) dengan prosentase 39% dan prosentase terkecil adalah prosentase 6% yaitu kurang dari 1 tahun (<1).

Data ini dapat memperlihatkan lama responden yang ada di UNJ yang terdiri dari dosen dan karyawan memiliki NPWP selama ia bekerja. Dalam penelitian ini, tidak jarang ditemui dosen dan karyawan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jarak ia bekerja dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak sesuai. Banyak dosen dan karyawan yang sudah lama bekerja di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

tetapi baru saja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ini dapat menggambarkan bagaimana kepatuhan dosen dan karyawan terhadap pajak yang harus ia bayarkan.

4.2.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini untuk menguji apakah dalam model regresi, baik variable dependen maupun variable independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

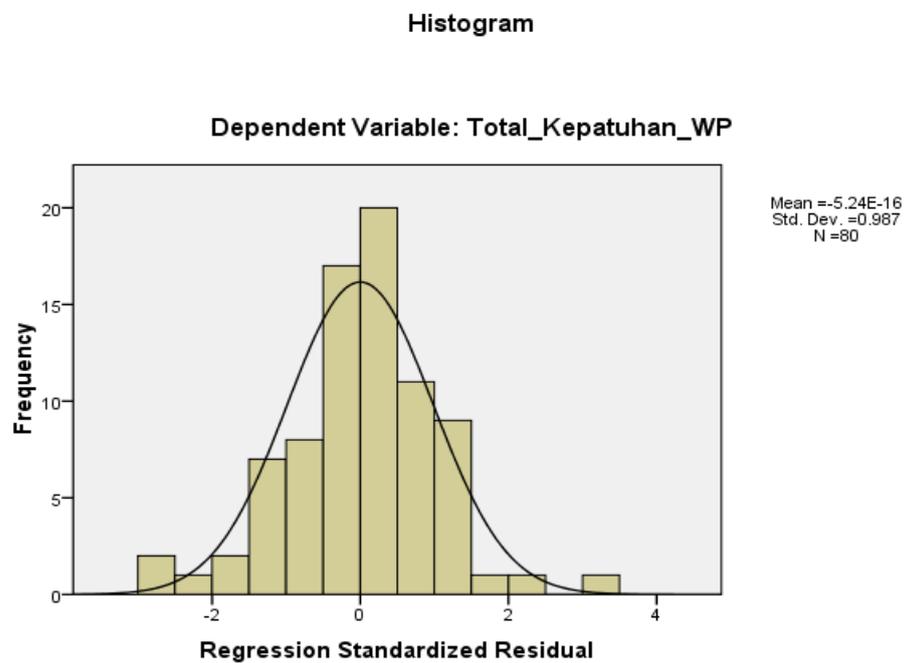
Namun demikian dengan hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sample yang sedikit. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Deteksi dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah hasil Histogram, Normal P-P Plot dan scatter plot untuk uji normalitas:

Gambar 4.1

Uji Asumsi Normalitas dengan Histogram
Variabel Dependen Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak



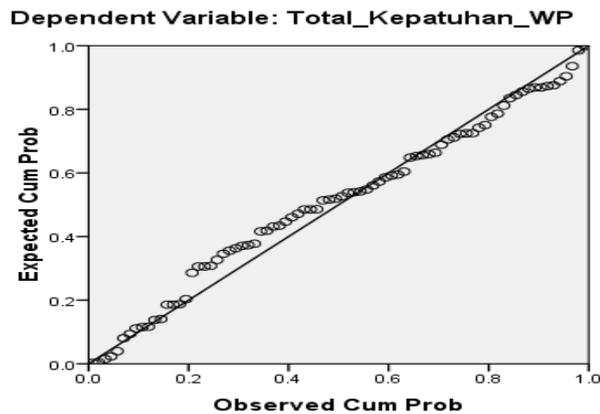
Sumber: Data Primer diolah 2012

Analisis grafik histogram dan grafik normal dapat terlihat bentuk grafik histogram atau grafik normal yang seperti lonceng dan dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menggambarkan pola distribusi normal.

Gambar 4.2

Grafik Normalitas Dengan P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer yang diolah, 2012

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji kolmogrov-smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.14 Sebagai berikut:

Tabel 4.14

Tabel Uji Statistik Non-Parametrik kolmogrov-Smirnov
One-Sample K-S Test

		Unstandardized Predicted Value
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.97488702
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.059
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.815
Asymp. Sig. (2-tailed)		.520

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah 2012

Besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,815 dan signifikan pada 0,520 berarti lebih besar dibandingkan nilai signifikan 0,5 dan hal ini menunjukkan data residual berdistribusi normal, hal ini menunjukkan hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya.

4.2.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi (hubungan) antar variabel independen. Menurut Imam Gozali (2011;105) multikolonieritas dapat juga dilihat dari *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF).

Kedua variabel ini menunjukkan setiap variabel manakah yang disajikan oleh variabel lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Cara mendeteksi multikolonieritas dengan menganalisis matrik kolerasi antar variabel independen dengan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.060	3.120		.660	.511		
1 Self Assessment System	.341	.126	.376	2.704	.008	.253	3.950
Account Representative	.554	.175	.441	3.165	.002	.253	3.950

Dependent Variable: KepatuhanWajib Pajak
Sumber : Data primer yang diolah 2012

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa besar korelasi antar variabel independen terlihat variabel independen memiliki *tolerance* 0.253 di bawah nilai 10 dan nilai VIF kurang dari 10 sebesar 3.950 . Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

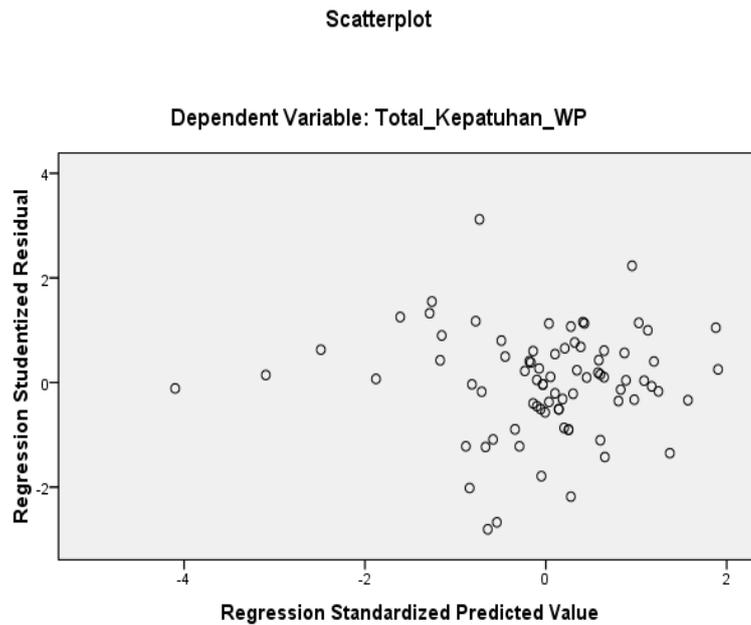
Menurut Imam Ghozali (2011 ; 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau ketidaksamaan *variance* yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk kedua persamaan menghasilkan kesimpulan yang serupa dimana model regresi terbebas dari gangguan heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut dapat dilihat dari hasil uji *scatterplot* untuk uji heteroskedastisitas.

Model penelitian ini menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.3
Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah 2012

Berdasarkan pada gambar *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa penyebaran data berada di atas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan penelitian ini tidak ada gangguan heterokedastisitas karena tidak ada pola yang terbentuk. Dan dari hasil penyebaran data diatas dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Selain itu pengujian lain menggunakan metode pengujian glesjer. Uji glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan abslut residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Tabel 4.16
Hasil Uji Glesjer

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.996	2.056		1.944	.056
	Total_SAS	.110	.083	.293	1.321	.190
	Total_AR	-.199	.115	-.383	-1.725	.089

a. Dependent Variable: ABSOLUTE

Sumber: Data Primer yang diolah 2012

Selain itu, dari hasil uji glesjer juga dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel *self assessment system* (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0.190 dan untuk *account representative* (X2) sebesar 0.089. dalam penelitian ini untuk variabel *self assessment system* (X1) dan *account representative* (X2) memiliki nilai signifikansi di atas angka 0.05 yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas masalah heterokedastisitas.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

4.2.3.1. Uji Regresi Berganda

Regresi merupakan teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel pada variabel lainnya. Uji regresi berganda dilakukan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu modal prediktif tunggal. Adapun model regresi penelitian dapat dirumuskan berdasarkan tabel *Coefficients*.

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e$$

Keterangan:

y = tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan beban pajak penghasilannya

α = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi untuk X_1 dan X_2

X_1 = *Self Assessment system*

X_2 = *Account Representative (AR)*

e = *error term*

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.060	3.120	.660	.511
	<i>Self Assessment System</i>	.341	.126	.376	.008
	<i>Account Representative</i>	.554	.175	.441	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel diatas dari hasil uji-t dapat diketahui bahwa konstanta sebesar 2.060 koefisien regresi untuk

variabel *self assessment system* sebesar 0.341 dan variabel *account representative* sebesar 0.554, maka dapat ditentukan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.060 + 0.341 (X_1) + 0.554 (X_2) + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 2.060 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebesar 2.060
- b. Koefisien regresi pelaksanaan *self assessment system* (X_1) sebesar 0,341 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi sebesar 0,341. hal ini menunjukkan bahwa jika pelaksanaan *self assessment system* di tingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.
- c. Koefisien peran *account representative* (X_2) sebesar 0,554 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam peran *account representative* terhadap Wajib Pajak (WP) Pribadi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi itu sendiri.

4.2.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.622	.613		4.02618

a. Predictors: (Constant), Account Representative, Self Assessment System

Sumber: Data primer yang diolah 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan SPSS 16 maka diperoleh koefisien determinasi (R^2) = 0,622. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 62,20% tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dosen dan karyawan UNJ dapat dijelaskan oleh variabel *self assessment system* dan peran *account representative*, sedangkan sisanya ($100\% - 62,20\% = 37,8\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.3.3. Uji Parsial (t- test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel independen. Dari variabel yang dimasukkan ke dalam model variabel *self assessment system* dan *account representative* dan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0.05. dan kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam penyeteroran beban tahunan. Kriteria penerimaan pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai $t_{hitung} < t_{table}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak

2. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima

Atau dengan cara melihat signifikansi t sebagai berikut:

1. Signifikansi $t < 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima
2. Signifikansi $t > 0.05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

Untuk nilai t-tabel untuk n 80 diperoleh yaitu sebesar 1.990. hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.19
Uji Parsial (t-test)

Model	T	Sig.
(Constant)	.660	.511
1 <i>Self Assessment System</i>	2.704	.008
<i>Account Representative</i>	3.165	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data primer yang diolah, 2012

a) **Hipotesis Pertama**

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan WP Pribadi.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.19 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.704 pada tingkat signifikan 0.008 dan t tabel 1.990. Jadi t hitung $>$ t tabel, H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti ada hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen. Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Sedangkan dari tingkat signifikan, *self assessment* sistem memiliki tingkat signifikan 0,008 jauh dibawah 0,05 dan dapat dikatakan hipotesis ini diterima.

b) Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan *account representative* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) Pribadi.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.19 diperoleh nilai t hitung sebesar 3.165 pada tingkat signifikan 0.002 dan tabel t tabel 1.990. jadi t hitung > t tabel, H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini berarti ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima.

4.2.3.4. Uji Simultan (F- test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen (Y) secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen (X_1 dan X_2).

H_0 : Tidak ada pengaruh secara simultan antara pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh

H₃: Adanya pengaruh secara simultan antara pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi.

Hasil uji F dapat dilihat dari output pada tabel ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 4.20

Uji Pengaruh Simultan (F Test)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2057.009	2	1028.505	63.448	.000 ^b
	Residual	1248.178	77	16.210		
	Total	3305.188	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), *Account Representative*, *Self Assessment System*

Sumber: Data primer yang diolah 2012

Uji pengaruh simultan (F-test) sebesar 63.448 dan signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi dari hasil uji F lebih kecil dibandingkan 0.05 dengan demikian H₀ ditolak dan H₃ diterima, yang berarti variabel independen yaitu *self assessment system* dan *account representative* secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi.

4.2.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data peneliti melibatkan 80 responden yang terdiri dari dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta. Dan dalam penelitian ini mencakup tiga variabel, variabel pertama pelaksanaan *self*

assessment system yang terdiri dari indikator mendaftar, menghitung, menyetor dan melapor dan variabel yang kedua yaitu adanya *account representative* yang terdiri dari indikator pelayanan, konsultasi dan pengawasan.

Hasil uji variabel pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* (AR) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

4.2.4.1. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak Pribadi.

Variabel pelaksanaan *self assessment system* menunjukkan hasil uji nilai t hitung 2,704 sedangkan t tabel 1,990. Jadi t hitung $>$ t tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil ini menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta. Diperoleh nilai t hitung 2.704 pada tingkat signifikan 0,008. Dengan nilai signifikan yang didapat sebesar 0,008 berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian pelaksanaan *self assessment system* akan berdampak terhadap patuh atau tidaknya dosen atau karyawan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadinya.

Secara teori tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) tergantung dari bagaimana menyikapi sistem *self assessment* yang selama ini telah diterapkan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), maka para Wajib Pajak

(WP) harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu negara. Pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap sistem yang diterapkan di suatu negara sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Solihin A Wahab (1997:105) dalam Yulianto (2009) menyatakan bahwa: “ keputusan seseorang untuk patuh terhadap peraturan merupakan fungsi dari: a) Kemungkinan bahwa setiap pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan; b) Tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran; c) Sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimated) peraturan yang berlaku; d) Beban bagi kelompok sasaran yang patuh yang menyangkut adanya contoh *reward* bagi kepatuhan dan *punishment* bagi pelanggaran.”

Diterapkannya sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia diharapkan perilaku Wajib Pajak (WP) orang pribadi agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaporkan kewajibannya, karena sistem ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mendaftar, menghitung, melaporkan kewajiban pajaknya secara jujur. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Self assessment system, Wajib Pajak (WP) orang pribadi ternyata masih dibebani biaya kepatuhan yang cukup tinggi, misalnya masih banyak Wajib Pajak

(WP) orang pribadi yang kurang mampu menghitung kewajibannya dengan baik sehingga tidak jarang ia menggunakan konsultan pajak untuk memperhitungkan jumlah pajak yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam rangka menghitung kewajibannya.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2009) penelitian tersebut memberikan simpulan bahwa pelaksanaan *self assessment system* walaupun belum meningkatkan secara optimal kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pembayaran pajak. Namun demikian pelaksanaan *self assessment system* mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam pembayaran pajak.

4.2.4.2. Pengaruh *Account Representative* terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Dalam penelitian ini nilai t hitung sebesar 3.165 pada tingkat signifikan 0.002 dan tabel t tabel 1.990, berarti nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0.05. Dapat disimpulkan bahwa *account representative* akan berdampak pada patuh atau tidaknya dosen dan karyawan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), *account representative* dengan tugas-tugas dan kegiatannya dapat terus melakukan konsultasi yang intensif melalui sosialisasi dan *visit* (kunjungan kerja) ke Universitas Negeri

Jakarta sebagai pemberi himbauan kepada Wajib Pajak (WP) seperti dosen dan karyawan dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak (WP). Jika sosialisasi yang di dapat oleh para Wajib Pajak (WP) sudah rutin, maka itu semua akan memudahkan dosen dan karyawan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tidak akan ada kesulitan dalam hal perpajakan jika pemberi himbauan juga memiliki *attitude* yang baik dan penjelasan yang di berikan mudah dipahami oleh dosen dan karyawan.

Sosialisasi yang didapat juga dapat menciptakan pemikiran tentang perpajakan tidak sesulit yang mereka pikirkan, hal ini karena dibantu oleh *account representative*, para dosen dan karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu membayarkan konsultan pajak dalam membantu untuk memperhitungkan kewajiban perpajakannya. Diharapkan juga jumlah Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan semakin berkurang dan akan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang.

Dengan adanya *account representative* sebagai mediator khusus, maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat lebih dimonitor. Sehingga diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat yang mengakibatkan meningkatnya penerimaan yang diharapkan dalam mencapai penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak dapat terealisasi dengan baik tanpa mendapat masalah yang cukup berarti dari Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh. Dengan kata lain, dengan adanya *account representative* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Zulkarnaen (2011) yang menyatakan ada perbedaan jumlah pelaporan SPT yang masuk sebelum adanya *account representative* dan sesudah adanya peran dari *account representative*. Sebelum *account representative* untuk tahun 2004-2006 hanya mengalami peningkatan rata-rata tiap tahunnya hanya 23.47% berbeda setelah *account representative* yaitu pada tahun 2007-2009 adanya peningkatan rata-rata sebesar 61.39%.

Tetapi penelitian ini memberikan simpulan yang berbeda dengan penelitian Amilin dan Nina Anisah (2008) yang memberikan bukti empiris hubungan negatif pada *account representative* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran *account representative* belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Karena hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya bagian dari *account representative* yang signifikan hanya pelayanan saja, sedangkan konsultasi dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP).

4.2.4.3. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak Pribadi.

Pada pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji- F , diperoleh nilai F hitung 63.448 pada tingkat signifikansi 0.000 berarti nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0.05, nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi yang berarti H_3 terbukti.

Seorang dosen dan karyawan (WP) dalam pelaksanaan *self assessment system* yang meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak (WP), menghitung beban PPh, menyetorkan beban PPh dan melaporkan beban PPh secara mandiri sesuai dengan system yang ditetapkan dan dengan peran seorang *account representative* dapat membantu kepercayaan seorang Wajib Pajak (WP) dalam menghitung besaran pajaknya.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak (WP). Apabila dari jasa seperti *account representative* dalam pelaksanaan *self assessment system* tidak memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa tersebut tidak berkualitas dan mutu pelayanannya kurang. Usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, harus dibuktikan dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) untuk melakukan sendiri kewajibannya sebagai pelaksana *self assessment system*.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan *account representative* dalam melayani Wajib Pajak (WP) dengan baik. Dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Dalam *self assessment system* hal ini sangat berguna untuk memperlancar pelaksanaan sistem tersebut. Sementara *account*

representative juga harus melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan, pelayanan dan pembinaan yang merata.

Jika pelaksanaan sistem *self assessment* yang diterapkan dibantu dengan *account representative* sesuai perannya, misalnya dalam pelayanan *account representative* sudah maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik untuk para Wajib Pajak misalnya pemberian informasi tentang peraturan pajak terbaru yang rutin diberikan.

Konsultasi yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) tentang masalah perpajakan dapat titik temu dalam meringankan permasalahan atau memberikan jalan keluar bagi masalah perpajakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh *account representative* dapat memberikan keyakinan bagi Wajib Pajak (WP) bahwa apa yang dia hitung dalam perhitungan perpajakan sesuai dengan peraturan pajak yang diterapkan dan perhitungan sudah benar dilakukan.

Dan yang terpenting adalah jaminan bahwa pajak yang dibayarkan harus masuk ke kas negara, sehingga akan mendorong masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pajak sebagai sumber terbesar negara benar-benar bisa diandalkan.

Dengan adanya peran *account representative* dalam membantu meringankan kinerja pelaksanaan *self assessment system* akan membantu meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi pada dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan wajib pajak (WP) pribadi. Sampel penelitian adalah para dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan memiliki hasil yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Semakin tinggi pemahaman para Wajib Pajak (WP) pada pelaksanaan *self assessment system* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Kebanyakan responden yang kurang mempercayai hasil hitung yang dilakukan oleh petugas pajak, oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan *self assessment system* akan menjadi kenyamanan sendiri bagi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP).

Jika pelaksanaan *self assessment system* itu ditekuni dan dipahami oleh Wajib Pajak (WP) dengan aturan yang ditentukan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) yang patuh. Para Wajib Pajak akan lebih mudah melakukan perhitungan beban pajaknya jika Wajib Pajak (WP) mengerti bagaimana proses perhitungan yang dilakukan.

2. Peran dari *account representative* berpengaruh positif dan memiliki hasil yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi. Artinya semakin tinggi peran yang dilakukan oleh *account representative* maka akan menimbulkan keinginan para Wajib Pajak (WP) untuk ingin memahami tentang pelaksanaan *self assessment system* dan hal itu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

Peran *account representative* bukan sebagai fiskus, tetapi seorang *account representative* lebih ke pelayanan, pengawasan, dan memberi konsultasi kepada Wajib Pajak (WP). Dalam pengawasan hal ini seorang *account representative* hanya memberi bimbingan kepada Wajib Pajak (WP) jika seorang Wajib Pajak (WP) butuh pengarahannya dalam perhitungan, jadi yang melakukan perhitungan tetap Wajib Pajak (WP) bersangkutan tanpa ikut campur seorang *account representative* dan hal ini sesuai dengan sistem yang dijalankan (*self assessment system*). Dan dapat disimpulkan dengan dibantu

peran *account representative* akan meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

3. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* dan *account representative* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) pribadi. Jika dalam pelaksanaan *self assessment system* terdapat peran *account representative* yang dijalankan dengan baik maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi pun akan meningkat.

Hal ini dapat berpengaruh pada keyakinan seorang Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya dan responden tahu apa yang sebenarnya mereka bayarkan, selain itu juga dengan adanya peran *account representative* akan memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku secara umum.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Banyak dosen dan karyawan yang tidak mengerti mengenai pelaksanaan pajak yang mereka lakukan. Memerlukan waktu yang lebih banyak jika dosen dan karyawan meminta penjelasan langsung dari peneliti, dan ini sangat tidak efisien
2. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini tidak hanya menaruh kuesioner di fakultas dan menunggu kuesioner terisi maximal 4 hari kemudian. Ada beberapa fakultas yang dalam penyebaran kuesioner mengharuskan peneliti langsung meminta dosen atau karyawan untuk mengisi kuesioner tersebut.
3. Pada saat penyebaran kuesioner dalam penelitian ini, tidak jarang ditemui dosen dan karyawan tidak cukup waktu untuk menjawab kuesioner dengan cermat dan seksama, jadi tidak jarang dosen dan karyawan meminta untuk mengembalikan kuesioner keesokan harinya. Dan ini merupakan kegiatan yang memakan waktu atau tidak efisien.
4. Responden penelitian ini rata-rata karyawan yang berpendidikan terakhir Diploma III dan Strata Satu (S1) sehingga kurang mewakili posisi dosen sebagai responden di Universitas Negeri Jakarta.

5.2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.2.2.1. Akademik

1. Bagi akademik, diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti lain, yang masih berhubungan dengan penelitian ini diharapkan menambahkan variabel lain untuk dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat Wajib Pajak (WP) orang pribadi seperti “Sosialisasi Perpajakan” kegiatan penyuluhan atau sosialisasi memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program dalam sosialisasi misalnya berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti seminar-seminar keberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, atau mengadakan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak dimana acara tersebut memiliki tujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak. Keberhasilan program sosialisasi dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak.

5.2.2.2. Praktis

1. Bagi dosen dan karyawan yang bekerja di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sebaiknya memiliki rasa ingin memahami dan mengerti tentang kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP). Hal itu akan menumbuhkan pemikiran bahwa

menjadi Wajib Pajak (WP) yang patuh tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan adanya bantuan dari *account representative*, bermaksud untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan dan dapat menumbuhkan rasa integritas tinggi terhadap pentingnya menjadi Wajib Pajak (WP) yang patuh akan peraturan pajak.

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menyediakan layanan perpajakan dalam bentuk penyuluhan atau mendatangkan petugas pajak untuk membantu dosen dan karyawan dalam menyetorkan beban Wajib Pajak (WP) pribadinya, agar lebih memperhatikan peran *account representative* dalam membimbing Wajib Pajak (WP). Karena dosen dan karyawan sempat mengalami kekecewaan terhadap pelayanan *account representative* pada saat dosen dan karyawan meminta bantuan untuk memberi penjelasan tentang bagaimana system pajak pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Account Representative (AR): Antara Wajib Pajak (WP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*, 2008^a. Indonesian Tax Riview, Vol I. Edisi 07
- Amilin dan Nina Anisah, 2008. *Pengaruh Persepsi Peran Account Representative (AR) Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jakarta: Trikonomika Vol. 7 No.2, Hal 145-152
- Aryo, Dharma, Budi, 2007. *Efektifitas Kepatuhan Sistem Self Assessment Pajak Penghasilan (pph) dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak pada KPP Jakarta Cilandak*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- FE UNJ, 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi*, Jakarta: FE Universitas Negeri Jakarta
- Gozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indrawati, Sri Mulyani, 2008. *Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern (Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.01)*. Jakarta
- Judisseno, Rimsky K., 2005. *Pajak & Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kompetensi Account Representative (AR) perlu ditingkatkan*, 2008^b. **Indonesian Tax Riview**, Vol I. Edisi 07
- Lubis, Irwansyah, 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS MEDIA
- Pradipta, Arya., John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, 2007. *Strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Vol. 6 No. 2, Hal 186-193

- Pandiangan, Liberti, 2008. *Modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan berdasarkan Undang- undang terbaru*, Jakarta: Elex Media Computindo
- Pratama, Ananta, 2010. *Peranan Account Representative (AR) dalam Proses Pembetulan Ketetapan Pajak Guna Meningkatkan Pelayanan Pajak: Studi Deskriptif Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya*, Jawa Timur: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1, Hal 26-35
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia, 2006. *Undang-undang Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Mengimplementasikan Organisasi Modern*. Menteri Keuangan.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang Nomor 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Undang-undang Nomor 98/KMK.01 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Mengimplementasikan Organisasi Modern*. Menteri Keuangan.
- Setiana, Sinta., Tan Kwang En dan Lidya Agustina, 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Bandung: Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 2, Hal 134-161
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sugiyono, 2011. *Metodelogi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh, 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, Universitas Udayana: Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4 No. 2, Hal 214- 219
- Supriyati & Nur Hidayati, 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Surabaya: Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7 No. 1, Hal 41-50
- Suwandi, Rezki Suhairi, 2008. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System Pada KPP Pratama Bandung*, Universitas Komputer Indonesia

- Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, Jawa Timur: JAAI, Vol. 10 No. 1, Hal 101-120
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, Widi dan Dedy Djefris, 2008. *Tax Payer's Rights: Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, Bandung: Alfabeta
- Yulianto, 2009. *Pengaruh Kebijakan Self Assessment System pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung*, Universitas Negeri Lampung: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 9 No. 1, Hal 1-11
- Zulkarnaen, 2011. *Peranan pelaksanaan tugas Account Representative dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Dua*, Universitas Krisnadipayana: Jurnal ekonomi dan Industri, Vol. 16 No. 2, Hal 63-83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Studi kasus terhadap tingkat kepatuhan Pelaporan Beban PPh Dosen dan Karyawan di Universitas Negeri Jakarta

IDENTITAS RESPONDEN

Untuk setiap pertanyaan berikut, mohon beri tanda ailing (X) atau cek list (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pilihan bapak/ibu atau mengisi data yang sesuai pada tempat yang disediakan.

1. Jenis Kelamin:

Laki – laki

Perempuan

2. Status bapak/ibu:

Kawin

Tidak Kawin

3. Lama bapak/ibu bekerja di Universitas Negeri Jakarta tahun/bulan*)

4. Pendidikan terakhir bapak/ibu:

Strata Tiga

Strata Dua

Strata Satu

Lainnya

5. Jabatan bapak/ibu di Universitas Negeri Jakarta:

Dosen

Karyawan

6. Sudah berapa lama bapak/ibu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tahun/bulan*)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PERNYATAAN

Beri tanda silang (X) atau tanda check list (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan pengalaman bapak/ibu pada tempat yang disediakan:

- (1) = Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) = Tidak Setuju (TS)
- (3) = Netral (N)
- (4) = Setuju (S)
- (5) = Sangat Setuju (SS)

Pelaksanaan <i>self assessment system</i>		KATEGORI JAWABAN				
Bagian A: Mendaftar		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya berkewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada wilayah kedudukan saya					
2	Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saya dapat mendaftarkan diri secara online					
3	Saya merasa kesulitan ketika mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP)					

Bagian B: Menghitung		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
4	Sebagai Wajib Pajak (WP), saya diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri beban pajak yang terutang					
5	Menghitung besar pajak sendiri, dapat meningkatkan kepercayaan dalam membayar pajak					
6	Administrasi pajak sulit dipahami dan membebani saya dalam melakukan perhitungan pajak					
7	Saya berkewajiban membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak terutang					

Bagian C: Menyetor		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
8	Saya mamapu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak terutang ke Kas Negara					
9	Saya melakukan pembayaran pajak terutang dalam batas waktu jatuh tempo					
10	Administrasi pajak sulit dipahami dan membebani saya dalam melakukan perhitungan pajak					
11	Saya membayar pajak terutang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menggunakan jasa Aparatur Pajak untuk menghitung pajak terutang					
12	Saya melaporkan pajak terutang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan					
13	Saya melaporkan pajak terutang tepat waktu, guna menghindari denda					
14	Saya melaporkan beban pajak terutang setelah mendapatkan surat teguran					

<i>Account Representative (AR)</i>		KATEGORI JAWABAN				
Bagian A: Pelayanan		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
15	Saya melaporkan beban pajak terutang setelah mendapatkan surat teguran					
16	Pelayanan yang optimal dari seorang <i>Account Representative (AR)</i> meningkatkan kesadaran saya akan kewajiban membayar pajak					
17	Informasi yang diberikan oleh <i>Account Representative (AR)</i> mudah difahami					

Bagian B: Konsultasi		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
18	Konsultasi mengenai perpajakan dapat					

	dilakukan melalui telepon atau tatp muka					
19	Ketentuan pajak yang terbaru rutin di informasikan oleh <i>Account Representative (AR)</i>					

Bagian C: Pengawasan		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
20	<i>Account Representative (AR)</i> menghimbau saya mengenai pembayaran dan pelaporan besarnya pajak terutang					
21	<i>Account Representative (AR)</i> menghubungi saya (WP) jika ada kekurangan dalam hal administrasi perpajakan					
22	<i>Account Representative (AR)</i> membuat nota perhitungan penerbitan surat tagihan pajak					
23	<i>Account Representative (AR)</i> menghimbau Wajib Pajak (WP) untuk penyetoran pajak dan pelaporan SPT masa dan Tahunan					

Kepatuhan Wajib Pajak		KATEGORI JAWABAN				
Bagian A: ketepatan waktu dalam penyampaian SPT		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
24	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPY) tepat waktu					
25	Prosedur yang sederhana mempermudah dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT)					

Bagian B: <i>law enfroncemen</i> (pengenaan sanksi)		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
26	Surat teguran mengingatkan saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan					
27	Sebagai Wajib Pajak (WP) patuh, saya					

	melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum diperiksa					
28	Sanksi yang diberikan mempengaruhi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP)					

Bagian C: Aspek Pembayaran dan <i>Income</i> (penghasilan)		KATEGORI JAWABAN				
No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
29	Membayar tunggakan pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo					
30	Wajib Pajak (WP) memperhitungkan risiko jika melakukan penghindaran pajak					
31	Faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi saya (WP) dalam melaporkan keseluruhan penghasilannya					
32	Pembayaran pajak yang saya (WP) lakukan merupakan unsur sukarela sebagai warga negara					
33	Saya akan membayar pajak jika diperlakukan adil dan dihargai oleh otoritas pajak					

LAMPIRAN 2 : DATA KUESIONER DOSEN DAN KARYAWAN, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TIMUR (UNJ)

VARIABEL XI: *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

No	PERNYATAAN														Jumlah	No	PERNYATAAN														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	1	2	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	48	23	4	4	2	4	4	3	4	4	2	3	4	5	4	4	51
2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	46	24	5	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	54
3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	52	25	4	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	5	49
4	5	5	2	4	4	2	5	5	4	3	2	4	4	5	54	26	5	4	4	3	2	4	4	4	4	2	3	2	4	5	50
5	5	5	1	4	4	2	4	4	3	3	3	4	4	4	50	27	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	45
6	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	3	1	1	1	20	28	5	4	2	3	4	5	4	3	5	5	3	4	4	4	55
7	5	5	2	2	3	4	4	2	3	2	3	4	4	5	48	29	4	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	47
8	1	4	2	4	4	2	4	4	4	4	3	5	4	3	48	30	5	4	1	5	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	56
9	1	5	1	5	5	4	5	5	5	5	1	5	5	1	53	31	5	2	2	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	2	47
10	1	4	1	4	4	2	3	3	4	2	4	4	4	3	43	32	5	2	2	5	4	2	5	4	5	5	2	4	5	5	55
11	1	5	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	52	33	4	5	2	4	4	2	4	4	2	2	2	5	5	5	50
12	4	5	2	3	4	2	5	4	5	4	1	4	5	4	52	34	5	5	2	5	5	2	5	5	5	5	1	4	5	5	59
13	1	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	45	35	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	62
14	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	1	5	5	4	51	36	2	1	3	3	3	4	3	4	2	4	4	2	4	2	41
15	1	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	39	37	4	4	2	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	46
16	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	54	38	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	49
17	1	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4	4	5	4	46	39	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	49
18	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	40	4	4	2	4	4	2	4	3	2	4	3	4	5	4	49
19	1	5	1	5	5	2	5	4	2	3	4	5	5	3	50	41	5	5	1	4	5	1	4	4	4	4	2	4	4	2	49
20	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	59	42	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	50
21	1	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	2	48	43	4	4	1	4	4	1	4	3	3	3	3	4	4	3	45
22	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	18	44	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	50

No	PERNYATAAN														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
45	5	3	2	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5	59
46	2	2	2	1	2	3	4	3	3	4	5	3	4	3	41
47	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	4	5	4	3	45
48	4	4	4	2	3	3	4	2	3	4	4	4	4	2	47
49	4	4	5	4	5	4	5	5	2	1	2	5	5	4	55
50	5	5	2	4	4	2	5	5	4	3	3	3	3	3	51
51	4	5	3	3	4	3	4	5	4	3	3	4	4	2	51
52	4	5	2	2	4	2	4	3	3	4	3	4	4	4	48
53	5	4	2	4	4	2	4	4	2	4	4	4	5	5	53
54	5	5	1	4	4	2	4	4	5	4	3	4	5	5	55
55	4	5	1	4	4	2	4	4	4	4	2	4	5	4	51
56	5	3	5	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	5	49
57	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	4	5	4	3	44
58	4	3	5	3	4	3	2	2	1	5	1	4	5	4	46
59	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	49
60	4	5	2	3	4	2	5	5	1	5	3	4	4	2	49
61	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	55
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	5	53
63	5	5	3	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	64
64	4	4	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	50
65	4	4	2	4	4	2	4	4	4	3	3	4	4	3	49
66	2	2	5	2	2	2	2	3	3	3	1	1	3	4	35

No	PERNYATAAN														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
67	2	2	4	1	2	1	2	3	3	4	1	3	3	3	34
68	2	3	4	2	3	2	1	2	4	3	2	3	4	4	39
69	1	1	4	5	3	1	2	4	5	4	2	3	5	4	44
70	2	4	5	5	2	2	3	3	5	1	3	4	3	4	46
71	1	2	5	5	2	2	3	4	4	2	2	3	4	5	44
72	2	4	2	4	1	4	4	3	4	2	2	5	3	5	45
73	4	4	2	4	2	3	5	4	2	5	5	4	4	5	53
74	3	5	2	3	3	4	5	4	3	4	4	5	3	1	49
75	3	5	1	2	4	5	4	5	2	5	5	3	4	2	50
76	2	5	3	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3	3	51
77	1	4	4	3	4	4	4	5	3	3	4	2	2	2	45
78	3	1	4	4	5	5	2	2	2	3	5	2	4	4	46
79	2	2	2	4	3	4	4	2	5	4	5	1	2	2	42
80	1	2	3	5	2	4	3	4	2	3	4	3	4	5	45
Jumlah	267	295	202	286	288	226	307	297	280	274	248	299	316	287	3872

VARIABEL X2: ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)

No	PERNYATAAN									Jumlah
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	4	4	2	4	4	2	4	4	3	31
2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	32
3	4	5	4	4	4	3	4	2	4	34
4	5	5	5	4	4	2	5	5	4	39
5	5	4	4	4	4	2	4	4	3	34
6	4	4	3	1	3	2	1	2	1	21
7	3	4	4	2	3	4	4	4	3	31
8	4	4	4	4	4	2	4	2	4	32
9	5	5	5	5	5	4	5	1	5	40
10	5	4	2	4	4	2	3	2	4	30
11	5	5	4	4	4	3	4	4	5	38
12	4	5	3	3	4	2	5	2	5	33
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	2	4	4	4	4	4	4	4	34
15	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
16	4	3	4	4	4	4	5	4	4	36
17	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
18	5	5	4	1	4	4	4	4	4	35
19	5	5	5	5	5	2	5	3	2	37
20	4	5	4	4	3	3	4	4	4	35
21	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
22	1	1	2	1	1	2	1	2	2	13

No	PERNYATAAN									Jumlah
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
23	4	4	4	4	4	3	4	4	2	33
24	4	4	4	4	4	3	4	3	4	34
25	4	2	4	4	4	2	4	4	4	32
26	4	4	4	3	2	4	4	4	4	33
27	4	3	4	3	3	3	4	3	3	30
28	5	4	4	3	4	5	4	5	5	39
29	4	4	4	4	3	3	4	3	3	32
30	5	4	4	5	4	4	5	5	4	40
31	5	2	4	4	4	2	4	3	4	32
32	5	2	4	5	4	2	5	4	5	36
33	4	5	5	4	4	2	4	5	2	35
34	5	5	4	5	5	2	5	4	5	40
35	5	5	5	5	5	1	5	5	5	41
36	2	1	3	3	3	4	3	4	2	25
37	4	4	4	4	4	2	4	4	3	33
38	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
39	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
40	4	4	4	4	4	2	4	2	2	30
41	5	5	4	4	5	1	4	5	4	37
42	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
43	4	4	3	4	4	1	4	4	3	31
44	4	4	4	4	4	2	4	2	4	32

No	PERNYATAAN									Jumlah
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
45	5	3	5	5	5	2	5	2	5	37
46	2	2	4	1	2	3	4	5	3	26
47	3	3	4	3	2	3	3	3	3	27
48	4	4	2	2	3	3	4	2	3	27
49	4	4	4	4	5	4	5	2	2	34
50	5	5	3	4	4	2	5	4	4	36
51	4	5	3	3	4	3	4	3	4	33
52	4	5	4	2	4	2	4	4	3	32
53	5	4	4	4	4	2	4	4	2	33
54	5	5	4	4	4	2	4	5	5	38
55	4	5	4	4	4	2	4	5	4	36
56	5	3	4	2	2	4	4	4	3	31
57	3	3	2	3	3	4	3	4	2	27
58	4	3	2	3	4	3	2	4	1	26
59	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
60	4	5	5	3	4	2	5	4	1	33
61	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
62	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
63	5	5	5	5	5	1	5	4	5	40
64	4	4	3	4	4	2	4	3	4	32
65	4	4	3	4	4	2	4	4	4	33
66	2	2	3	2	2	2	2	5	3	23

No	PERNYATAAN									Jumlah
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
67	2	2	3	1	2	1	2	2	3	18
68	2	3	4	2	3	2	1	2	4	23
69	1	1	3	5	3	1	2	3	5	24
70	2	4	3	5	2	2	3	3	5	29
71	1	2	5	5	2	2	3	4	4	28
72	2	4	4	4	1	4	4	5	4	32
73	4	4	4	4	2	3	5	4	2	32
74	3	5	3	3	3	4	5	3	3	32
75	3	5	3	2	4	5	4	3	2	31
76	2	5	3	4	3	4	3	2	4	30
77	1	4	4	3	4	4	4	1	3	28
78	3	1	4	4	5	5	2	1	2	27
79	4	2	4	4	3	4	4	1	5	31
80	3	2	4	5	2	4	3	1	2	26
Jumlah	301	300	301	286	288	226	307	275	280	2564

VARIABEL XI: TINGKAT KEPATUHAN DOSEN DAN KARYAWAN

No	PERNYATAAN										Jumlah
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	34
2	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	37
3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	39
4	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	46
5	5	5	4	4	4	4	5	2	4	4	41
6	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	21
7	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	38
8	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	36
9	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	42
10	4	3	4	1	2	4	5	1	2	3	29
11	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	41
12	5	5	4	3	3	5	5	3	2	4	39
13	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	34
14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
15	4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	35
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
17	5	4	4	4	4	4	2	2	4	4	37
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	5	5	4	3	5	5	5	4	3	3	42
20	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	46
21	5	4	2	3	4	4	4	4	4	2	36
22	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	15

No	PERNYATAAN										Jumlah
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
23	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
24	4	5	4	5	4	4	4	3	3	5	41
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	40
27	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	36
28	4	5	3	5	4	4	5	5	5	4	44
29	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	36
30	4	4	4	3	4	3	4	3	5	4	38
31	4	4	4	2	4	4	4	3	3	2	34
32	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	43
33	4	5	2	4	5	4	4	5	5	5	43
34	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	5	3	3	3	3	4	4	5	4	2	36
37	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	34
38	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	34
39	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	34
40	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	37
41	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	40
42	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	40
43	4	4	2	3	3	4	2	2	4	3	31
44	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	36

No	PERNYATAAN										Jumlah
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
45	5	5	5	5	5	5	2	3	2	5	42
46	1	3	3	3	4	4	3	5	5	3	34
47	3	3	4	5	4	5	3	4	3	3	37
48	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
49	4	5	2	1	4	4	4	4	2	4	34
50	5	5	3	3	3	3	3	3	4	3	35
51	4	3	2	3	3	3	4	2	3	2	29
52	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	36
53	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	43
54	5	5	4	4	4	3	3	4	5	5	42
55	5	5	3	3	4	5	3	3	5	4	40
56	4	4	2	4	4	3	3	4	4	5	37
57	1	1	2	4	2	4	1	2	4	3	24
58	3	5	2	3	2	4	2	3	4	4	32
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	5	4	2	2	5	4	3	4	4	2	35
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
63	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
64	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	39
65	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	35
66	3	2	3	4	3	1	1	1	5	4	27

No	PERNYATAAN										Jumlah
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
67	3	2	4	4	3	2	2	1	2	3	26
68	4	3	4	4	4	3	3	2	2	4	33
69	2	3	4	4	3	4	2	3	3	4	32
70	4	4	5	5	3	3	3	3	3	4	37
71	5	5	5	5	5	5	2	4	4	5	45
72	4	1	5	4	4	3	2	3	5	5	36
73	3	2	3	4	4	4	4	4	4	5	37
74	5	2	3	5	3	5	5	3	3	1	35
75	5	4	2	3	3	3	4	5	3	2	34
76	4	3	1	2	3	4	2	5	2	3	29
77	4	4	1	3	4	3	3	3	1	2	28
78	4	5	2	3	4	3	2	4	1	4	32
79	4	3	2	1	4	3	1	2	1	2	23
80	5	3	1	3	4	1	1	3	1	5	27
Jumlah	320	310	273	290	301	297	272	280	275	287	2905

P_9	Pearson Correlatic	.624*	0,42	0,388	0,04	0,355	.734**	-0,221	-0,287	1	.838**	.547*	.873**	0,132	.943**	.550*	0,43	.724**	.833**
	Sig. (2-tailed)	0,013	0,12	0,153	0,9	0,193	0,002	0,429	0,299		0	0,035	0	0,64	0	0,034	0,11	0,002	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_10	Pearson Correlatic	.731**	.523*	0,118	0,38	0,337	.635*	-0,476	-0,212	.838**	1	0,448	.896**	-0,01	.798**	.590*	0,49	.835**	.804**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,05	0,676	0,16	0,22	0,011	0,073	0,448	0		0,094	0	0,977	0	0,021	0,06	0	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_11	Pearson Correlatic	0,39	0,47	.566*	0,37	.518*	0,184	-0,165	-0,319	.547*	0,448	1	0,5	0,357	0,491	0,449	0,37	0,241	.669**
	Sig. (2-tailed)	0,151	0,08	0,028	0,18	0,048	0,512	0,557	0,247	0,035	0,094		0,057	0,191	0,063	0,093	0,18	0,387	0,006
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_12	Pearson Correlatic	.535*	0,49	0,27	0,3	0,355	.734**	-0,221	-0,287	.873**	.896**	0,5	1	0,132	.876**	.550*	0,43	.884**	.853**
	Sig. (2-tailed)	0,04	0,06	0,33	0,29	0,193	0,002	0,429	0,299	0	0	0,057		0,64	0	0,034	0,11	0	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_13	Pearson Correlatic	0,191	-0,02	.717**	0,43	.644**	0,215	0,352	0,161	0,132	-0,008	0,357	0,132	1	0,144	0,317	0,37	-0,034	0,49
	Sig. (2-tailed)	0,496	0,96	0,003	0,11	0,01	0,441	0,199	0,567	0,64	0,977	0,191	0,64		0,608	0,25	0,18	0,904	0,064
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_14	Pearson Correlatic	.661**	0,29	0,374	0	0,29	.743**	-0,171	-0,145	.943**	.798**	0,491	.876**	0,144	1	0,384	0,45	.734**	.809**
	Sig. (2-tailed)	0,007	0,3	0,17	1	0,295	0,001	0,542	0,606	0	0	0,063	0	0,608		0,157	0,1	0,002	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_15	Pearson Correlatic	0,254	.605*	0,386	.546*	.605*	0,313	-0,008	-0,02	.550*	.590*	0,449	.550*	0,317	0,384	1	.561*	0,501	.742**
	Sig. (2-tailed)	0,36	0,02	0,156	0,04	0,017	0,256	0,978	0,945	0,034	0,021	0,093	0,034	0,25	0,157		0,03	0,057	0,002
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_16	Pearson Correlatic	.591*	0,02	0,253	0,35	0,476	0,364	-0,009	-0,023	0,428	0,493	0,368	0,428	0,368	0,446	.561*	1	0,229	.595*
	Sig. (2-tailed)	0,02	0,94	0,363	0,21	0,073	0,182	0,975	0,936	0,111	0,062	0,177	0,111	0,177	0,095	0,03		0,411	0,019
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_17	Pearson Correlatic	0,374	0,5	0,069	0,34	0,332	.717**	-0,312	-0,103	.724**	.835**	0,241	.884**	-0,03	.734**	0,501	0,23	1	.724**
	Sig. (2-tailed)	0,17	0,06	0,807	0,22	0,226	0,003	0,258	0,715	0,002	0	0,387	0	0,904	0,002	0,057	0,41		0,002
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

P_25	Pearson Correlation	0,244	.643**	-0,288	0,307	-0,105	.530*	-0,128	1	-0,243	0,366	0,494	0,094	.575*	0,078	0,44
	Sig. (2-tailed)	0,381	0,01	0,298	0,266	0,71	0,042	0,649		0,383	0,18	0,061	0,74	0,025	0,783	0,101
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_26	Pearson Correlation	-0,006	-0,067	0,245	0,301	-0,239	0,451	.816**	-0,243	1	0	0,055	0,509	0,071	0,129	0,38
	Sig. (2-tailed)	0,983	0,813	0,379	0,275	0,392	0,091	0	0,383		1	0,846	0,052	0,802	0,646	0,163
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_27	Pearson Correlation	.714**	.549*	0,361	0,207	.553*	.535*	-0,054	0,366	0	1	.521*	0,384	.561*	.607*	.785**
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,034	0,186	0,458	0,033	0,04	0,85	0,18	1		0,047	0,158	0,03	0,016	0,001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_28	Pearson Correlation	.666**	.763**	-0,374	0,467	0,017	0,462	-0,145	0,494	0,055	.521*	1	.741**	.606*	.676**	.734**
	Sig. (2-tailed)	0,007	0,001	0,17	0,079	0,953	0,083	0,607	0,061	0,846	0,047		0,002	0,017	0,006	0,002
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_29	Pearson Correlation	.625*	0,47	-0,182	0,503	-0,006	0,433	0,211	0,094	0,509	0,384	.741**	1	.603*	.723**	.759**
	Sig. (2-tailed)	0,013	0,077	0,517	0,056	0,982	0,107	0,45	0,74	0,052	0,158	0,002		0,017	0,002	0,001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_30	Pearson Correlation	.725**	.630*	0,031	.736**	0,204	0,504	-0,131	.575*	0,071	.561*	.606*	.603*	1	0,437	.812**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,012	0,911	0,002	0,467	0,055	0,642	0,025	0,802	0,03	0,017	0,017		0,103	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_31	Pearson Correlation	.635*	0,317	0,026	0,059	0,339	0,353	-0,125	0,078	0,129	.607*	.676**	.723**	0,437	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	0,011	0,25	0,928	0,835	0,216	0,197	0,657	0,783	0,646	0,016	0,006	0,002	0,103		0,008
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AR	Pearson Correlation	.817**	.703**	0,218	.627*	0,32	.643**	0,17	0,44	0,38	.785**	.734**	.759**	.812**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0,003	0,435	0,012	0,245	0,01	0,545	0,101	0,163	0,001	0,002	0,001	0	0,008	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

P_38	Pearson Correlation	.541*	-0,512	.598*	0,317	0,245	.612*	1	0,453	.859**	.915**	-0,17	0,306	0,249	.810**
	Sig. (2-tailed)	0,037	0,051	0,019	0,25	0,379	0,015		0,09	0	0	0,545	0,267	0,371	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_39	Pearson Correlation	0,468	-0,138	0,023	0,392	0,323	0,452	0,453	1	.547*	0,419	0	.523*	0,093	.614*
	Sig. (2-tailed)	0,078	0,625	0,936	0,149	0,241	0,091	0,09		0,035	0,12	1	0,046	0,742	0,015
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_40	Pearson Correlation	0,458	-.646**	.545*	0,345	.525*	.716**	.859**	.547*	1	.851**	-0,102	0,249	0,164	.823**
	Sig. (2-tailed)	0,086	0,009	0,036	0,207	0,045	0,003	0	0,035		0	0,716	0,37	0,56	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_41	Pearson Correlation	0,418	-.576*	.715**	0,248	0,358	.692**	.915**	0,419	.851**	1	-0,153	0,157	0,193	.795**
	Sig. (2-tailed)	0,121	0,025	0,003	0,373	0,19	0,004	0	0,12	0		0,587	0,576	0,491	0
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_42	Pearson Correlation	0	0,464	-0,02	0,283	0,314	0,033	-0,17	0	-0,102	-0,153	1	0,028	.783**	0,274
	Sig. (2-tailed)	1	0,082	0,946	0,306	0,255	0,907	0,545	1	0,716	0,587		0,922	0,001	0,324
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_43	Pearson Correlation	0,296	0,192	-0,31	-0,106	-0,306	-0,118	0,306	.523*	0,249	0,157	0,028	1	-0,015	0,225
	Sig. (2-tailed)	0,285	0,492	0,265	0,707	0,268	0,676	0,267	0,046	0,37	0,576	0,922		0,959	0,419
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
P_44	Pearson Correlation	0,315	0,282	0,295	0,389	0,412	0,194	0,249	0,093	0,164	0,193	.783**	-0,015	1	.572*
	Sig. (2-tailed)	0,253	0,308	0,287	0,151	0,127	0,489	0,371	0,742	0,56	0,491	0,001	0,959		0,026
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Kepatu	Pearson Correlation	.589*	-0,293	.672**	.623*	.555*	.802**	.810**	.614*	.823**	.795**	0,274	0,225	.572*	1
	Sig. (2-tailed)	0,021	0,29	0,006	0,013	0,032	0	0	0,015	0	0	0,324	0,419	0,026	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4**TABEL RINGKASAN HASIL UJI VALIDITAS**

No	R HITUNG	R TABEL	KETERAANGAN
<i>Self Assessment System (X1)</i>			
1	0.620	0.482	Valid
2	0.555	0.482	Valid
3	0.545	0.482	Valid
4	0.522	0.482	Valid
5	0.648	0.482	Valid
6	0.625	0.482	Valid
7	-0,05	0.482	Tidak Valid
8	-0.01	0.482	Tidak Valid
9	0,833	0.482	Valid
10	0.804	0.482	Valid
11	0,669	0.482	Valid
12	0.853	0.482	Valid
13	0.49	0.482	Tidak Valid
14	0.809	0.482	Valid
15	0.742	0.482	Valid
16	0.595	0.482	Valid
17	0.742	0.482	Valid
<i>Account Representative (AR) (X2)</i>			
18	0,817	0.482	Valid
19	0.703	0.482	Valid
20	0.218	0.482	Tidak Valid
21	0.627	0.482	Valid
22	0.32	0.482	Tidak Valid
23	0.643	0.482	Valid
24	0,17	0.482	Tidak Valid

25	0.44	0.482	Tidak Valid
26	0.38	0.482	Tidak Valid
27	0.785	0.482	Valid
28	0.734	0.482	Valid
29	0.759	0.482	Valid
30	0.812	0.482	Valid
31	6.65	0.482	Valid
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN DAN KARYAWAN DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (Y)			
32	0,589	0.482	Valid
33	-0.293	0.482	Tidak Valid
34	0.672	0.482	Valid
35	0.623	0.482	Valid
36	0.555	0.482	Valid
37	0.802	0.482	Valid
38	0,810	0.482	Valid
39	0.614	0.482	Valid
40	0.823	0.482	Valid
41	0.795	0.482	Valid
42	0.274	0.482	Tidak Valid
43	0,225	0.482	Tidak Valid
44	0.572	0.482	Valid

LAMPIRAN 5

UJI RELIABILITAS

1. Reliabilitas Variabel Y : Kepatuhan Wajib Pajak

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.882	.884	10

2. Realibilitas Variabel X1 : *Self Assessment System*

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.914	.918	14

3. Reliabilitas Variabel X2 : *Account Representative*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.905	.909	9

4. Reliabilitas untuk X1, X2 dan Y

(Pelaksanaan *self assessment system*, adanya *account representative* terhadap tingkat kepatuhan dosen dan karyawan)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	33

LAMPIRAN 6

UJI UJI MULTIKOLONIERITAS

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Total_AR, Total_SAS ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.622	.613	4.02618

a. Predictors: (Constant), Total_AR, Total_SAS

b. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2057.009	2	1028.505	63.448	.000 ^a
	Residual	1248.178	77	16.210		
	Total	3305.188	79			

a. Predictors: (Constant), Total_AR, Total_SAS

b. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.060	3.120		.660	.511		
	Total_SAS	.341	.126	.376	2.704	.008	.253	3.950
	Total_AR	.554	.175	.441	3.165	.002	.253	3.950

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Coefficient Correlations^a

Model			Total_AR	Total_SAS
1	Correlations	Total_AR	1.000	-.864
		Total_SAS	-.864	1.000
	Covariances	Total_AR	.031	-.019
		Total_SAS	-.019	.016

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Total SAS	Total AR
1	1	2.983	1.000	.00	.00	.00
	2	.014	14.385	.96	.04	.10
	3	.003	31.142	.04	.96	.90

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

LAMPIRAN 7
UJI HETEROSKEDASTISITAS

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2057.009	2	1028.505	63.448	.000 ^a
	Residual	1248.178	77	16.210		
	Total	3305.188	79			

a. Predictors: (Constant), Total_AR, Total_SAS

b. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Total SAS	Total AR
1	1	2.983	1.000	.00	.00	.00
	2	.014	14.385	.96	.04	.10
	3	.003	31.142	.04	.96	.90

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15.3973	46.0334	36.3125	5.10275	80
Std. Predicted Value	-4.099	1.905	.000	1.000	80
Standard Error of Predicted Value	.452	2.186	.723	.294	80
Adjusted Predicted Value	15.5238	45.9509	36.3099	5.10936	80
Residual	-1.1036E1	12.43126	.00000	3.97489	80
Std. Residual	-2.741	3.088	.000	.987	80
Stud. Residual	-2.807	3.120	.000	1.004	80
Deleted Residual	-1.1569E1	12.69233	.00265	4.10931	80
Stud. Deleted Residual	-2.943	3.316	-.001	1.026	80
Mahal. Distance	.009	22.310	1.975	3.317	80
Cook's Distance	.000	.127	.011	.021	80
Centered Leverage Value	.000	.282	.025	.042	80

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan_WP

LAMPIRAN 8

SURAT IZIN PENELELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 Bag. UHTP : Telp. 4893726,
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawalan : 4890536, HUMAS : 4896486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 3124/H39.12/PL/2012 15 Mei 2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian untuk Skripsi

Yth. **Dr. rar. nat. Apriliana, M.Pd**
Pembantu Dekan I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
di tempat

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Riza Reslia**
Nomor Registrasi : 8335088355
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Untuk mengadakan : Penelitian untuk Skripsi

Di : **Universitas Negeri Jakarta**
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul
"Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System da Adanya Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Beban PPh Dosen dan Karyawan di Universitas Negeri Jakarta)."

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Drs. Syaifulah
NIP. 19570216 198403 1 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Akuntansi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 Bag. UHTP : Telp. 4893726,
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawain : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2905/H39.12/PL/2012 9 Mei 2012
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian untuk Skripsi

Yth. **Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd**
Pembantu Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni
di tempat

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Riza Reslia**
Nomor Registrasi : 8335088355
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Untuk mengadakan : Penelitian untuk Skripsi

Di : **Universitas Negeri Jakarta**
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul
"Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Adanya Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Penyetoran Beban PPh Tahunan Wajib Pajak Prang Pribadi (Study Kasus Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Beban PPh Dosen dan Karyawan di Universitas Negeri Jakarta)."

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Akuntansi



LAMPIRAN 9

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA dan ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus B, Jl. Pemuda 10 Rawamangun Jakarta 13220
Telepon : (021) 4894909 Fax. : (021) 4894909 E-mail : dekanfmipa@unj.ac.id
Laman :

Jakarta, 23 Mei 2012

No : 223/06.FMIPA/DT/2012
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian a.n. Riza Reslia

Kepada Yth.
Kepala BAAK
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara No. 3124/H39.12/PL/2012 tertanggal 15 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Riza Reslia
No. Reg. : 8335088355
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan. Namun demikian untuk mengetahui hal-hal yang perlu kami siapkan untuk membantu penulisan skripsi tersebut kami mohon yang bersangkutan untuk menemui PD I FMIPA terlebih dahulu untuk berkoordinasi.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



- Tembusan:**
1. Dekan FMIPA, FE
 2. PD II
 3. Kaprog/Jurusan Akuntansi
 4. Ka TU FMIPA



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Gedung E Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4895124, Fax. (021) 4895124 - 29266100 Email dekan-fbs@unj.ac.id
Laman www.unj.ac.id

Nomor *338*/6.FBS/PP/V/2012
Hal : Pemberian izin

15 Mei 2012

Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta

Dengan hormat,

Membalas surat Bapak No. 2905/H39.12/PL/2012 tertanggal 9 Mei 2012 tentang permohonan izin mengadakan penelitian di FBS atas nama Riza Reslia mahasiswa Ekonomi UNJ, pada prinsipnya kami mengizinkan dan sesuai aturan yang berlaku tidak mengganggu tugas-tugas rutin.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Pembantu Dekan I,

Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd.
NIP 196805291992032001

Tembusan:

1. Dekan
2. PD II
3. Kabag TU FBS